



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

SKRIPSI

**Hubungan Ketergantungan Tiongkok dan Hong Kong dibawah “One
Country, Two System” dalam Bidang Ekonomi Tahun 2008 - 2015**

Diajukan oleh:

Mutia Ramadhani Riz

17323105

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021

**Hubungan Ketergantungan Tiongkok dan Hong Kong dibawah “One
Country, Two System” dalam Bidang Ekonomi Tahun 2008 - 2015**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan
Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Guna Memenuhi Sebagai Syarat
Meperoleh Derajat S1 Hubungan Internasional



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Disusun oleh:

Mutia Ramadhani Riz

17323105

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

Hubungan Ketergantungan Tiongkok dan Hong Kong dibawah “One Country, Two System” dalam Bidang Ekonomi Tahun 2008 – 2015

Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Syarat Sebagian Dari

Syarat-Syarat Guna Memperoleh Derajat Sarjana

S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

18 Maret 2021

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi



(Hanna Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A)

Dewan Penguji:

1. Muhammad Zulfikar Rakhmat, B.A., M.A., Ph.D.
2. Enggar Furi Herdianto S.IP., M.A.
3. Hasbi Aswar S.IP., M.A.
4. Willi Ashadi, S.HI., M.A.

Tanda Tangan

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mutia Ramadhani Riz
No. Mahasiswa : 17323105
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Hubungan Ketergantungan Tiongkok dan Hong Kong dibawah “One Country, Two System” dalam Bidang Ekonomi Tahun 2008 – 2015

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan Tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karena jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara menyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 22 Maret 2021



Mutia Ramadhani Riz

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

Ayah dan Ibu

Atas segala doa, dukungan, perjuangan, pengorbanan, nasehat, semangat yang tak terhingga, yang telah diberikan selama ini

Semua Keluarga Besar

Terima kasih atas, doa, nasehat dan dukungannya yang telah diberikan selama ini

Rekan-Rekan HI UII Angkatan 2017

Terima kasih atas kebersamaan, kegembiraan, serta perjuangan bersama selama kuliah di HI UII

HALAMAN MOTTO

“Be of good cheer. Do not think of today's failures, but of the success that may come tomorrow. You have set yourselves a difficult task, but you will succeed if you persevere; and you will find a joy in overcoming obstacles. Remember, no effort that we make to attain something beautiful is ever lost.”

(Helen Keller)



KATA PENGANTAR

Segala puja puji dan syukur tiada hingga ke hadirat Allah Subhanallahuwa ta'alla yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas nikmat dan rahmat-Nya, serta segala kekuatan, kemudahan dan kelancaran sehingga tulisan ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian tugas akhir ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan dukungan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada pada penulis.
2. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc. Ph.D.
3. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Hanga Fathana S.IP., B.Int.St., M.A selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Muhammad Zulfikar Rakhmat, B.A., M.A., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan tugas akhir saya. Terimakasih telah meluangkan waktunya dan juga saran yang telah diberikan selama saya mengerjakan tugas akhir saya. Saya sangat bersyukur mendapatkan dosen pembimbing yang telah banyak memberikan saya masukan dan saran dari awal mengerjakan hingga akhir skripsi ini selesai. Tanpa bantuan dan dukungan dari Pak Fikar, saya mungkin tidak akan bisa sampai ditahap ini. Saya memohon maaf untuk waktu yang melelahkan dan tersita dalam proses penulisan skripsi. Semoga pak Fikar selalu diberikan kesehatan, mendapatkan berkah, dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
6. Seluruh dosen Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Terima kasih untuk ilmu, serta pelajaran yang telah diberikan selama saya berkuliah di Universitas Islam Indonesia.
7. Keluarga saya terutama Papa dan Bunda, Terimakasih atas doa dan dukungannya dari awal saya bangku kuliah hingga sekarang. Terimakasih telah mempercayai saya dalam segala hal termasuk merantau ke Yogyakarta dalam menempuh pendidikan. Terimakasih atas keringat, kasih sayang dan pengorbanan yang telah diberikan selama saya menjalankan status saya

menjadi mahasiswa. Tanpa dukungan dari papa dan bunda, saya tidak akan mampu untuk sampai di titik sekarang. Saya memohon maaf jika saya sering membuat kesalahan. Terimakasih banyak Semoga Papa dan Bunda diberikan berkah, dilancarkan rezekinya, dan diberikah keehatan oleh Allah SWT.

8. Mama dan bapak yang tiada hentinya memberikan doa, cinta dan kasih sayang, support serta pengorbanan yang telah banyak diberikan. Saya sangat bersyukur atas segala hal yang diberikan. Semoga Mama dan Bapak akan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
9. Abang Tefan dan adik Olif, terimakasih atas dukungan dan support yang terus diberikan. Terimakasih telah menjadi tempat saya mengeluh dan mengutarakan kelelahan saya.
10. Muhammad Istiqlal yang telah menjadi support system saya. Terimakasih atas doa dan dukungan yang diberikan serta menjadi tempat untuk saya berkeluh kesah.
11. Suryani dan Indah Sukma Ramadhani terimakasih telah menjadi teman yang selalu ada untuk saya ketika saya membutuhkan kalian. Terimakasih telah menjadi pendengar yang baik dan terimakasih atas doa yang diberikan dalam menjalankan skripsi saya.
12. Anak kos Ragil, Kintan Amanda, Intan M, Tiara C. dan Putri Wira telah menjadi teman pertama saya sejak pertama kali datang di Yogyakarta. Terimakasih atas segala kenangan, saran dan pengalaman yang telah diberikan.
13. Nanda Rizki Amaliah, Indri Indah F, Ajeng Mawarningtyas dan Cindi Juliana yang telah menjadi teman saya sejak pertama perkuliahan hingga sekarang. Terimakasih telah menjadi tempat saya berkeluh kesah. Terimakasih atas doa dan dukungan kalian dalam menjalankan tugas perkuliahan awal hingga tugas akhir yang telah dikerjakan. Semoga setelah ini, kita akan tetap saling berkabar dan tidak saling melupakan satu sama lain.
14. Semua pihak yang turut memberi dukungan dalam bentuk doa, materi, semangat, serta nasehat kepada penulis.

ABSTRAK

Hong Kong merupakan wilayah di Tiongkok yang memiliki status wilayah administrasi khusus yang diberikan oleh Tiongkok. Hong Kong disebut sebagai Daerah Administratif Khusus karena sistem politik yang digunakan di Hong Kong adalah demokrasi dan kapitalisme berbeda dengan Tiongkok yang menggunakan sistem politik sosialisme. Hong Kong didirikan dibawah formula "One Country, Two System" untuk mempertahankan sistem mereka yang telah lama digunakan sejak menjadi koloni Inggris setelah terjadinya Opium War. Kemudian, dikarenakan adanya kepentingan Tiongkok yang ingin mereka penuhi, hal tersebut mengancam keberadaan Hong Kong sebagai wilayah yang demokratis. Hal ini membuat Hong Kong mengalami krisis politik dan tentu saja hal tersebut mempengaruhi perekonomian Hong Kong. Dalam menganalisis perekonomian Hong Kong dibawah formula "One Country, Two System", penulis menggunakan teori *Interdependensi Kompleks* karena melihat adanya kebutuhan ekonomi Tiongkok bergantung kepada Hong Kong. Penelitian ini menemukan bahwa ketiga karakteristik dari teori Interdependensi Kompleks dapat menjelaskan perekonomian dibawah formula "One Country, Two System" yang dibentuk Tiongkok. Yang pertama adalah, dalam penyelesaian isu untuk mempertahankan keberadaan Hong Kong, Tiongkok tidak pernah menggunakan kekuatan militer. Namun mereka membentuk formula untuk mengunci posisi Hong Kong. Kedua, hubungan kedua aktor yaitu Tiongkok dan Hong Kong dimana Hong Kong dikembalikan ke Tiongkok setelah sewa Inggris selesai. Terakhir, adanya kepentingan masing – masing aktor yaitu Tiongkok untuk mempertahankan wilayah mereka dan Hong Kong yang ingin tetap menjadi demokrasi dan ingin menjadi negara berdaulat.

Kata Kunci: Hong Kong, Tiongkok, One Country Two System, Teori Interdependensi Kompleks, Ekonomi

ABSTRACT

Hong Kong is a region in China that has special administrative territory status granted by China. Hong Kong is referred to as the Special Administrative Region because the political system used in Hong Kong are democracy and capitalism is different from China which uses the political system of socialism. Hong Kong was founded under the formula "One Country, Two System" to maintain their long-used system since becoming a British colony after the Opium War. Then, because of China's national interests that they wanted to fulfill, it threatened Hong Kong's existence as a democratic territory. This caused Hong Kong to experience a political crisis and of course it affected Hong Kong's economy. To analyzing Hong Kong's economy under the "One Country, Two System" formula, the authors used the Complex Interdependence theory because it explain that China's economic needs depended on Hong Kong. The study found that the three characteristics of the Complex Interdependence theory may explain the economy under the Chinese formula of "One Country, Two System". The first is, in resolving the issue of maintaining Hong Kong's existence, China has never used military force. But they formed a formula to maintain Hong Kong's position. Second, the relationship between the two actors is China and Hong Kong where Hong Kong is returned to China after the UK lease is completed. Lastly, it is in the interests of each actor,

China to defend their territory and Hong Kong who want to remain a democracy and want to become a sovereign state.

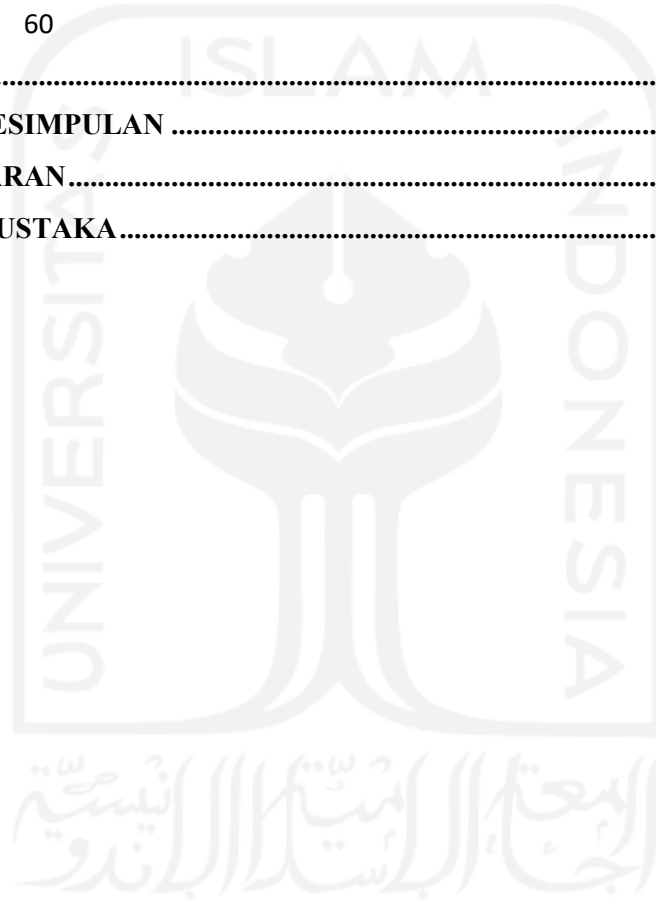
Keywords: Hong Kong, China, One Country Two System, Complex Interdependence Theory, Economy



DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Signifikansi	7
1.5 Cakupan Penelitian.....	8
1.6 Tinjauan Pustaka	9
1.7 Landasan Teori/Konsep/Model	13
1.8 Metode Penelitian.....	16
a) Jenis Penelitian.....	16
b) Subjek dan Objek Penelitian.....	16
c) Metode Pengumpulan Data.....	16
d) Proses Penelitian	17
BAB II.....	18
2.1 Latar Belakang Tiongkok Mempertahankan Hong Kong	18
2.2 Peran “One Country, Two System” dalam Politik Hong Kong.....	20
2.3 Perekonomian Hong Kong dibawah “One Country, Two System” Sebelum dan Pasca Krisis Ekonomi 2008.....	26
BAB III.....	33
3.1 Implikasi Kebijakan “One Country, Two System” (The Role of Force) ...	34

3.1.1	Kebijakan “One Country, Two System” bagi Hong Kong.....	41
3.1.2	Kebijakan “One Country, Two System” dengan Karakteristik Tiongkok.....	45
3.2	Hong Kong dan Tiongkok dalam Mencapai Tujuan Kedua belah pihak (Multiple Issues).....	48
3.2.1	Tiongkok Membutuhkan Hong Kong dalam Bidang Ekonomi.....	49
3.2.2	National Interest Hong Kong	55
3.3	Perekonomian Hong Kong dibawah “One Country, Two System” (Multiple Channels).....	58
3.3.1	Pemulihan Ekonomi dan Restrukturisasi Ekonomi Tahun 2008 – 2015 60	
BAB IV	71
4.1	KESIMPULAN	71
4.2	SARAN.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Karakteristik Teori Interdependensi Kompleks



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1: Stok kumulatif investasi langsung luar negeri Tiongkok

Grafik 2: Valuta asing global Remnibi

Grafik 3: GDP (US\$) - China, Hong Kong SAR

Grafik 4: Indeks Kebebasan Ekonomi



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Serangan opium Inggris terhadap Tiongkok pada abad ke-19 mengubah sisi imperialisme Barat menjadi tujuan utamanya dari Barat dan Asia Timur. Selama tahun 1836-1838, Inggris dalam Chartist Movement secara bertahap mendapatkan kekuatan, Inggris menyelundupkan opium ke Tiongkok yang hal tersebut tentu saja bertentangan dengan hukum Tiongkok. Karena pada saat itu, Tiongkok menutup diri dari pengaruh Barat. Perdagangan opium ini tidak hanya merugikan ekonomi Tiongkok, tetapi juga berdampak buruk pada kondisi kesehatan dan moral masyarakat Tiongkok secara umum. Dengan tindakan yang dilakukan Inggris tersebut, terjadilah Opium War I dan dimenangkan oleh Inggris.

Kekalahan yang dialami Tiongkok dikarenakan peralatan militer yang terbelakang dan kurangnya pengalaman praktis perang modern. Pada tanggal 29 Agustus 1842, Perjanjian Nanjing ditandatangani. Didalam perjanjian ini, pihak Tiongkok sangat dirugikan dan dalam Perjanjian Nanjing semua kepentingan lebih terkonsentrasi pada Inggris (Guan, 1984). Perjanjian itu mengharuskan Tiongkok menyerahkan Hong Kong ke Inggris dan membuka pelabuhan baru untuk perdagangan Inggris. Inggris juga mendesak Tiongkok untuk melegalkan dan mengenakan pajak opium untuk meringankan keuangan Inggris dan mendapatkan kendali atas perdagangan.

Opium War kedua pecah pada tahun 1856 diawali dengan ketika para pejabat Kanton melakukan pembajakan kapal dan merobek bendera Inggris. Menanggapi hal tersebut, kapal-kapal Inggris menyerang kota dan dimenangkan oleh Inggris dengan mudah. Inggris meminta memperluas kekuasaannya ke seluruh Tiongkok. Setelah itu, Perjanjian Tientsin ditandatangani pada Juni 1858, kemudian membuka perdagangan legal yang menguntungkan Inggris (Feige, 2005). Setelah terjadinya Opium War tersebut, Hong Kong masuk kedalam pemerintah Inggris. Tiongkok harus merelakan Hong Kong berada bersama Inggris. Wilayah yang bernama Kowloon (wilayah administratif Hong Kong) yang disewa oleh Inggris pada Maret 1860. Kemudian, diadakan Konvensi Peking untuk mengakhiri penyewaan Hong Kong oleh Inggris, dan kemudian memberikan tanah Hong Kong pada Inggris tanggal 24 Oktober 1860 (Treat).

Pada tanggal 25 Desember 1941, pada saat perang dunia II, Jepang berhasil menguasai Hong Kong. Namun, perang dunia ke II dimenangkan oleh sekutu sehingga tanah jajahan Jepang harus dikembalikan. Dan Hong Kong harus dikembalikan kepada Inggris tahun 1945 karena sekutu menang (Harris, 1972). Dalam Konvensi Peking, Inggris menyewa sebidang tanah di belakang Kowloon yaitu yang sekarang Hong Kong selama 99 tahun. Kemudian diadakannya deklarasi China-Britain di Beijing. Dan Tiongkok mengizinkan sewa Inggris berakhir pada tahun 1997. Pada tanggal 1 Juli 1997, Inggris mengembalikan Hong Kong kepada Tiongkok dan Hong Kong menjadi Daerah Administratif Khusus (SAR) di bawah kedaulatan Tiongkok (Fifield, 1950).

Didalam sejarahnya Hong Kong, Inggris menguasai Hong Kong dibanding Tiongkok akibat melemahnya Dinasti Qing. Perang Opium menyebabkan Dinasti

Qing kehilangan kekuasaannya di Hong Kong. Namun, setelah Hong Kong dikembalikan kepada Tiongkok pada tahun 1997, Hong Kong mengalami banyak demo besar – besaran. Sebagian besar demo yang terjadi menentang aturan Tiongkok. Wilayah – wilayah seperti Taiwan, Makau dan Hong Kong kedudukannya belum dianggap sebagai negara. Seluruh administrasi utamanya berada di Beijing, Tiongkok daratan. Deng Xiaoping yang merupakan Pemimpin Tiongkok mengusulkan ide “One Country, Two System”. Menurut Undang-Undang Dasar, mini-konstitusi Hong Kong, SAR akan diatur berdasarkan prinsip “One Country, Two System”. Di dalam prinsip ini, sistem sosialis dan kebijakan yang ada di Tiongkok daratan tidak akan dipraktikkan di Hong Kong, dan sistem kapitalis Hong Kong dan cara hidup harus tetap tidak berubah dan akan berubah untuk lima puluh tahun yang akan datang dimulai tahun 1997 (Wan, 2007).

Setelah terjadinya Opium War, Perang Dunia ke II, Hong Kong yang berada di bawah kendali Inggris dan Inggris berperan sebagai koloni yang kuat secara ekonomi. Dengan begitu, Tiongkok mempersiapkan sebuah formula yaitu “One Country, Two System”. Formula ini akan memiliki periode selama 50 tahun. Para petinggi Tiongkok mengadopsi “One Country, Two System” agar tidak seperti negara Jerman dan dua negara Korea. Penduduk Hong Kong mulai menerima formula itu karena mereka tidak punya banyak pilihan untuk menolak. Kemudian secara ekonomi, Hong Kong menjadi pelabuhan masuk dan keluar untuk perdagangan barang-barang industri antara Tiongkok dan Barat (Williamson, 1989).

Krisis ekonomi global pada tahun 2008 terutama di Asia, berdampak pada perekonomian Hong Kong. Terjadi krisis global tahun 2008 (The Great Recession)

memberikan dampak yang besar terutama di Asia Timur dan Asia Tenggara. Penundaan dalam mengambil tindakan untuk menangani masalah di negara-negara tertentu membuat masalah ekonomi ini sulit diselesaikan oleh beberapa negara. Termasuk Hong Kong, Hong Kong tidak bisa menghindari efek penularan dari krisis tersebut. Krisis ini memicu serangan spekulatif besar terhadap dolar Hong Kong, Likuiditas ketat di bank-bank, suku bunga lokal yang lebih tinggi dan kemunduran yang parah di pasar saham lokal. Yang dapat bertahan hanyalah mata uang dan sektor keuangan yang secara keseluruhan berdiri kokoh selama krisis, namun bisnis menurun dan ekonomi mengalami penurunan yang signifikan menjelang akhir tahun.

Perekonomian Hong Kong akibat krisis keuangan global menurun pada paruh kedua tahun 2008 yang mengakibatkan mitra dagang utama Hong Kong menurun. Selain itu, dampak yang dihasilkan dari adanya krisis tersebut juga permintaan domestik melemah, pertumbuhan ekspor melambat, inflasi sedang, kondisi pasar tenaga kerja yang memburuk, merosotnya harga saham, penurunan pasar properti, meredakan inflasi dan meningkatnya pengangguran. Dampak krisis ini sangat tidak menentu yang mengakibatkan risiko ekonomi Hong Kong masih berlanjut hingga 2009. Tahun 2008 menjadi awal bagi Hong Kong untuk membangun perekonomiannya kembali (Economic and Banking Environment, 2008).

Penyelesaian krisis ekonomi Hong Kong sejak tahun 2008 akan diselesaikan dalam sistem “One Country, Two System”. Sistem sebelumnya yaitu “Sovereignty Resumption”, dan sekarang Beijing mempresentasikan kebijakan baru, yang disebut “One Country, Two System”. Sistem ini akan digunakan Beijing

untuk mengklarifikasi bagaimana Beijing akan memerintah Hong Kong setelah melanjutkan kedaulatan wilayahnya. Singkatnya, kebijakan "One Country, Two System " memiliki unsur-unsur utama sebagai berikut:

1. Hong Kong dapat memisahkan sistem kapitalisnya dari sistem komunis di daratan, sehingga kebijakan tersebut dinamakan "One Country, Two System".
2. Hong Kong akan memiliki otonomi yang tinggi dalam menjalankan urusan ekonomi, budaya, dan politiknya. Hong Kong juga dapat mempertahankan polisi dan angkatan bersenjata sendiri, mata uang, kebiasaan sosial kapitalisnya dan institusi, dan Hong Kong akan memiliki hukum dan pengadilannya sendiri. Hukum dan peraturan daratan tidak akan diterapkan di Hong Kong. Beijing dan pemerintah lokal lainnya di daratan tidak akan mencampuri urusan Hong Kong kecuali yang menyangkut diplomasi luar negeri.
3. Orang Hong Kong yang dapat memerintah Hong Kong (gangren zhigang). Pemerintah Hong Kong akan dipilih oleh rakyat Hong Kong, Beijing tidak akan mengirimkan pejabat apapun untuk menjalankan pemerintahan Hong Kong.
4. "One Country, Two System" akan tetap tidak berubah selama 50 tahun setelah daratan kembali kedaulatan Hong Kong pada tahun 1997.

Pada tanggal 3 April 2019, pemerintah Hong Kong secara resmi memperkenalkan RUU ekstradisi di badan legislatif Hong Kong, Dewan Legislatif (LegCo). RUU ini mengusulkan perubahan pada undang-undang ekstradisi wilayah ke negara-negara yurisdiksi di mana Hong Kong tidak memiliki perjanjian seperti

itu, termasuk Tiongkok daratan, Makau, dan Taiwan. RUU itu juga akan mengalihkan wewenang ekstradisi dari LegCo ke kepala eksekutif Hong Kong yang pro-Beijing. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya protes besar - besaran yang terjadi di Hong Kong dimulai tanggal 31 Maret 2019. Demonstrasi ini terjadi karena masyarakat menentang usulan amandemen undang – undang ekstradisi Hong Kong yang kemudian demonstrasi ini menjadi sebuah penyampaian aspirasi masyarakat tentang hak – hak demokrasi. Para pemimpin pemerintah Hong Kong telah memperburuk rasa frustrasi para pengunjung. Akibatnya, beberapa aktivis melakukan bentuk pembangkangan sipil yang lebih tegas, termasuk menduduki bandara internasional dan memblokir jalan raya utama.

Pada awal Juli, 4 ketegangan menyebabkan pengunjung rasa menyerbu Dewan Legislatif (LegCo). Penghentian kerja yang luas termasuk di antara pegawai negeri, pengawas lalu lintas udara, dan pekerja di Disneyland Hong Kong juga mencerminkan skala kemarahan publik terhadap administrasi Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam dan dengan campur tangan pemerintah Tiongkok di Hong Kong. Selama terjadi kerusuhan tersebut, pemerintah Tiongkok berusaha untuk mengontrol dan mempengaruhi narasi tentang protes Hong Kong melalui sensor media yang kuat dan sistem propaganda. Pemerintah Tiongkok yang memiliki *garnisun* (kelompok pasukan yang berada di suatu lokasi) beranggotakan 6.000 tentara yang ditempatkan di Hong Kong dan ribuan lainnya di seberang perbatasan. Pengamat Hong Kong prihatin bahwa situasi dapat memburuk dengan cepat, dan bahkan meningkat menjadi jenis kekerasan yang dilakukan oleh militer Tiongkok selama Pembantaian Lapangan Tiananmen tahun 1989 (Annie Boyajian, 2019).

Adanya RUU Ekstradisi ini memicu protes dari warga Hong Kong karena dianggap aturan tersebut berpotensi mengancam demokrasi dan hukum di wilayah Hong Kong. Hal ini menyebabkan Hong Kong mengalami krisis politik dan memicu demo besar – besaran (Meick, 2019). Krisis politik sejak Hong Kong diserahkan ke Tiongkok menyebabkan perubahan kepada perekonomian Hong Kong. Dengan adanya formula “One Country, Two System”, Hong Kong tidak memiliki ruang bebas untuk menentukan nasib perekonomiannya.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Hubungan Ketergantungan Tiongkok dan Hong Kong dibawah “One Country, Two System” dalam Bidang Ekonomi tahun 2008 – 2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kedudukan Tiongkok “One Country, Two System” mempengaruhi krisis Hong Kong di bidang ekonomi tahun 2008 – 2015.
2. Untuk menganalisis kedudukan Tiongkok “One Country, Two System” mempengaruhi krisis Hong Kong.
3. Untuk menganalisis perekonomian Hong Kong pada tahun 2008 sampai 2015.

1.4 Signifikansi

Signifikansi dari penelitian ini adalah:

Penelitian ini penting karena melihat kebijakan yang dibuat Tiongkok “One Country, Two System” ini sangat mempengaruhi kebijakan ekonomi Hong Kong yang kapitalis. Penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya karena membahas kebijakan tersebut difokuskan di Hong Kong. Selain itu, penelitian ini berfokus kepada kondisi perekonomian Hong Kong dibawah kebijakan “One Country, Two System”. Kemudian, keberadaan Hong Kong yang berada di bawah pemerintahan Tiongkok membuat Hong Kong harus tetap mengikuti Undang – Undang yang berlaku didalam Tiongkok. Kebijakan “One Country, Two System” yang dikeluarkan oleh Deng Xiaoping yang bertujuan untuk reunifikasi negara dibawah Tiongkok tidak sesuai dengan keinginan masyarakat Hong Kong yang menginginkan demokrasi. Hal ini membuat masyarakat Hongkong melakukan demonstrasi besar – besaran dan adanya hal tersebut mempengaruhi perekonomian Hong Kong.

1.5 Cakupan Penelitian

Adapun cakupan penelitian ini adalah:

Penelitian ini berfokus kepada Tiongkok dan negara bagian Hong Kong. Dengan adanya krisis politik yang menimpa Hong Kong, Perekonomian Hong Kong menjadi tidak stabil dan penelitian ini berfokus kepada bidang ekonomi. Penelitian ini juga berfokus mulai pada tahun 2008 sampai 2015. Dimulai dari tahun 2008 karena setelah terjadinya krisis ekonomi global, Hong Kong menjadi salah satu negara yang perekonomiannya maju setara dengan kota – kota besar lainnya seperti Tokyo, London, Paris, dan sebagainya. Krisis politik yang telah

dialami Hong Kong juga masih berdampak hingga saat ini namun untuk menjadi perbandingan dibatasi hingga tahun 2015. Penelitian ini juga berfokus kepada teori interdependensi kompleks karena krisis politik Hong Kong berdampak pada ekonomi Hong Kong.

1.6 Tinjauan Pustaka

Peristiwa setelah Hong Kong dikembalikan ke Tiongkok pada tahun 1997, setelah pengalihan kedaulatan, Hong Kong diberikan kebebasan yaitu Daerah Administratif Khusus (SAR). Pemerintah SAR dilihat sebagai negara yang memiliki tingkat otonomi tinggi. Menurut tulisan Jane C. Y. Lee, hal ini dikarenakan tingkat ketidakpercayaan antara Hong Kong dan Tiongkok daratan selama transisi politik pra-1997 telah berkurang secara dramatis. Selain itu, menurut perspektif Lee, kebijakan “One Country, Two System” menunjukkan bahwa SAR dan pemerintah pusat telah melakukan upaya besar untuk memastikan keberhasilan dari kebijakan tersebut. Hong Kong menjadi masyarakat yang terbuka dan dinamis. Reunifikasi Hong Kong dengan Tiongkok terjadi untuk perkembangan politik domestik Tiongkok menjadi stabil dan untuk menonjolkan peran internasionalnya. SAR Hong Kong memiliki peran strategis utama untuk memfasilitasi proses reformasi domestik dan liberalisasi pasar di Tiongkok dan membantu meningkatkan posisi internasional Tiongkok (Lee J. C., 1999).

Dijelaskan lebih dalam oleh Tiexun mengenai kebijakan “One Country Two System”, “One Country Two System” dalam bahasa Mandarin

yaitu 一国两制 (Yi Guo Liang Zhi) yang di dirumuskan oleh Deng Xiaoping untuk tujuan penyatuan negara Tiongkok secara damai pada tahun 1980 an. Didalam jurnal Tiexun, dijelaskan bahwa Komunis Tiongkok menganggap konsep "One Country, Two System" adalah penemuan baru yang ilmiah dan desain utama yang terhubung dengan ortodoks Marxisme-Leninisme. Konsep "One Country, Two System" merupakan bagian penting dari sosialisme dengan karakteristik Tiongkok yang memiliki untuk membangun dan memajukan sosialisme. Deng Xiaoping menyarankan bahwa adanya satu negara dua sistem sebagai bentuk yang menyatakan bahwa Tiongkok adalah satu. Wilayah diluar Tiongkok daratan seperti Taiwan, Hong Kong dan Makau memiliki sistem ekonomi dan administrasi yang berbeda dengan Tiongkok, di Tiongkok daratan masih menggunakan sosialisme dengan sistem karakteristik Tiongkok. Ketiga wilayah seperti Taiwan, Hong Kong dan Makau memiliki sistem pemerintahan sendiri, urusan hukum, ekonomi dan keuangan, politik dan termasuk hubungan dagang dengan negara-negara asing (Tiexun, On the Fundamental Characteristics of "One Country Two System" Policy).

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Yew Chiew Ping and Kwong Kin-ming, mereka melihat dari sudut pandang historis, identitas Hong Kong terdiri dari dua elemen kunci yang bertentangan dengan identitas nasional Tiongkok: rasa berhak warga Hong Kong dalam politik, dan perlawanan terhadap Partai Komunis Tiongkok (PKT). Bagi colonial, Hong Kong adalah tempat yang aman yang memberi mereka perlindungan dari kekacauan politik Tiongkok dan di mana mereka dapat memperoleh

kehidupan yang layak dengan kerja keras. Beijing meningkatkan intervensinya dalam pemerintahan Hong Kong. Beberapa bentuk intervensi, seperti upaya untuk memperluas front persatuan dan jaringan dukungan politik, dan menumbuhkan generasi muda taipan Hong Kong dan elit lain sebagai pemimpin politik. Bagi warga Hong Kong, cinta Tiongkok tidak selalu berarti cinta PKC. Peneliti juga menjelaskan bahwa, hal ini menggambarkan sifat kompleks identitas Hong Kong yang tidak sepenuhnya menolak gagasan menjadi 'China' tetapi mendefinisikannya dengan cara yang berbeda melalui menghubungkan kasih sayang dengan norma-norma Hong Kong (Kin-ming, 2014).

Diperkuat kembali oleh jurnal yang diteliti oleh So, Hong Kong sering disebut sebagai bar batu ren ketika Inggris menguasai Hong Kong pada tahun 1842. Inggris mengubah wilayah Hong Kong dari "batu tandus" menjadi "Pearl of the Orient". Inggris melembagakan aturan hukum, menciptakan birokrasi efisien yang bebas dari korupsi, membangun infrastruktur modern, melembagakan sistem pajak rendah, dan mengadopsi kebijakan ekonomi pasar bebas (*laissez-faire*) yang menarik investasi asing dan membangkitkan kapitalis di Hong Kong. Dengan begitu, So mengatakan Hong Kong dikenal sebagai kapitalis "surga" yang memiliki ekonomi paling bebas di dunia. Pada akhir 1990-an, perkembangan Hong Kong dipengaruhi oleh peristiwa di wilayah Asia seperti krisis keuangan Asia, meningkatnya persaingan untuk kota-kota metropolitan global di Asia, dan meningkatnya permusuhan antara daratan Tiongkok dan Taiwan. Asian financial crisis menyebar dari Thailand ke Korea, Indonesia, Malaysia, Hong Kong SAR,

dan negara lain pada tahun 1997. Namun, Hong Kong beruntung karena krisis Asia terjadi setelah Tiongkok berhasil memulai kedaulatannya pada 1 Juli 1997. Selain itu, krisis Asia mencapai Hong Kong pada saat SAR telah membangun basis ekonomi yang kuat yang akan mengatasi gejolak ekonomi. Pemerintah Hong Kong telah mengakumulasi cadangan fiskal dan valuta asing yang substansial pada tahun 1997 (So, 2001).

Chiu didalam jurnalnya menegaskan bahwa, pemerintahan Hong Kong mengalami krisis atas identitas politiknya. Peneliti mengatakan bahwa setelah Hong Kong diserahkan kembali ke pemerintahan Tiongkok, Hong Kong harus tetap tunduk dibawah kebijakan “One Country, Two System”. Namun, masyarakat Hong Kong tetap menginginkan demokrasi. Krisis yang diterima oleh Hong Kong mengakibatkan kepada beberapa sektor masyarakat terutama dalam sektor ekonomi. Integrasi ekonomi antara Hong Kong dan wilayah Delta Sungai Mutiara telah membawa masalah ekonomi, sosial dan politik bagi Hong Kong. Salah satu masalah ekonominya adalah perubahan struktural ekonomi Hong Kong. Para pekerja yang sebelumnya bekerja di industri manufaktur di Hong Kong kehilangan pekerjaan mereka. Banyak yang telah pindah ke sektor jasa. Hong Kong merupakan gerbang antara Tiongkok dan Barat, Hong Kong pertama kali berkembang sebagai tempat tempat penimbunan barang (entrepot). Namun, Komunis menggeser perdagangan Tiongkok ke arah blok Soviet. Dengan demikian perdagangan entrepot Hong Kong terhenti, Hong Kong harus mencari peluang bisnis lain sebagai kapitalis (Chiu, 2002).

Dari kelima literatur di atas, penelitian ini akan mencoba melihat bagaimana kebijakan “One Country, Two System” mempengaruhi identitas politik Hong Kong. Selain itu, kebijakan yang dikeluarkan Tiongkok akan mempengaruhi keadaan perekonomian Hong Kong sebagai Daerah Administratif Khusus Tiongkok. Penelitian ini akan melengkapi penelitian sebelumnya karena berfokus kepada perekonomian Hong Kong dibawah kebijakan “One Country, Two System” diawali tahun 2008 setelah Financial crisis. Hong Kong yang memiliki sistem ekonomi terbuka dan sebagai pusat keuangan internasional, perkembangan ekonominya menghadapi banyak tantangan baru karena dampak krisis keuangan global. Sehingga penulis akan meneliti lebih dalam dan berfokus kepada perekonomian Hong Kong dibawah kebijakan “One Country Two System” pada tahun 2008 hingga 2015.

1.7 Landasan Teori/Konsep/Model

Teori Interpedence Complex merupakan teori yang menjelaskan bagaimana saling ketergantungan yang kompleks terkadang lebih mendekati kenyataan daripada realisme. Didalam buku yang di tulis oleh Robert O. Keohane, mengatakan bahwa setiap negara berusaha untuk Realisme dan Interdependensi Kompleks mempertahankan wilayah dan kepentingannya dari ancaman yang nyata atau yang dirasakan. Selain itu, teori ini juga menjelaskan bagaimana integrasi politik antar negara kecil hanya akan melayani kepentingan nasional negara-negara yang paling kuat. Dijelaskan juga bahwa aktor transnasional tidak ada atau secara politik tidak penting. Hanya penerapan kekuatan yang mahir atau ancaman kekerasan yang memungkinkan negara untuk bertahan hidup, dan hanya ketika

negara berhasil menyesuaikan kepentingan mereka, seperti dalam keseimbangan kekuasaan yang berfungsi dengan baik maka sistem tersebut akan stabil.

Penulis akan menggunakan Teori Interdependence Complex karena seperti yang ditulis oleh Robert O. Keohane, didalam teori ini ada 3 karakteristik utama yang sesuai dengan isu yang dibahas. Pertama, Multiple Channels, yaitu merupakan sebuah penghubung masyarakat seperti hubungan informal, antar elit pemerintah hubungan informal antara elit nonpemerintah dan organisasi transnasional (seperti bank atau perusahaan multinasional). Multiple channels dapat dianggap sebagai hubungan antar negara bagian, antarpemerintah, dan transnasional. Multiple Channels juga menjelaskan bagaimana perusahaan multinasional dan bank mempengaruhi hubungan domestik dan antar negara bagian (Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, 2011). Sesuai dengan isu dibahas, poin ini akan menjelaskan bagaimana hubungan negara dan negara bagian yaitu Tiongkok dan Hongkok. Selain itu, dalam karakteristik ini juga akan membahas bagaimana penyatuan Hong Kong kepada Tiongkok dengan sistem yang dibentuk Tiongkok yaitu “One Country, Two System”.

Karakteristik yang kedua yaitu, Multiple Issues atau hubungan antarnegara tidak diatur dalam hierarki yang jelas atau konsisten. Absennya hierarki antar persoalan ini antara lain berarti keamanan militer tidak secara konsisten mendominasi agenda. Banyak masalah muncul dari apa yang dulu dianggap sebagai kebijakan dalam negeri, dan perbedaan antara masalah dalam negeri dan luar negeri menjadi tidak jelas. Hal ini bermaksud bahwa setiap actor memiliki Masalah yang berbeda menghasilkan tujuan dan national interestnya masing – masing (Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, 2011). Karakteristik yang kedua ini akan menjelaskan

Tiongkok dan Hong Kong memiliki national interestnya masing – masing. Seperti Hong Kong yang ingin mempertahankan sistem negaranya dan Tiongkok yang tetap mempertahankan Hong Kong sebagai bagian dari mereka untuk alasan ekonomi dan kepentingan politik terkait Hong Kong, Taiwan dan Makau.

Karakteristik yang ketiga adalah kekuatan militer tidak digunakan oleh pemerintah terhadap pemerintah lain di dalam kawasan, atau dalam masalah, Ketika saling ketergantungan yang kompleks terjadi. Namun, hal ini menjadi penting dalam hubungan pemerintah dengan pemerintah di luar wilayah tersebut, atau dalam masalah lain. Kekuatan militer, misalnya, dapat menjadi tidak relevan untuk menyelesaikan ketidaksepakatan tentang masalah ekonomi di antara anggota aliansi, namun pada saat yang sama menjadi sangat penting untuk hubungan politik dan militer aliansi dengan blok saingan. Didalam isu yang dijelaskan, Hong Kong dan Tiongkok tidak menggunakan kekuatan militer, karena Tiongkok telah membentuk sebuah sistem yang tetap mempersatukan mereka di bawah Tiongkok (Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, 2011).

Dalam melakukan penelitian, penulis akan menggunakan Teori Interdependence Complex menurut Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye, JR. yang ditulis dalam bukunya berjudul *Power and Interdependence* karena karakteristik yang dijelaskan oleh Keohane dalam bukunya sesuai dengan isu yang sedang dibahas dan dapat menjelaskan fenomena yang sedang diteliti.

1.8 Metode Penelitian

a) Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam meneliti adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Dalam hal ini, metode kualitatif didefinisikan sebagai metode yang prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang terdiri dari kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Suhandoyo, 2013). Selain itu, analisis deskriptif yang dihasilkan akan menjawab dari rumusan masalah dan mendukung argumen peneliti dalam meneliti mengenai kedudukan kebijakan “Two Country/ Two System” milik Tiongkok mempengaruhi Hong Kong secara ekonomi pada tahun 2008 hingga 2015.

b) Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Tiongkok karena didalam penelitian ini akan fokus kepada kebijakan yang dimiliki oleh Tiongkok yaitu “One Country, Two System”. Kemudian didalam penelitian ini juga Hong Kong akan menjadi objek karena kebijakan yang ada akan mempengaruhi keadaan politik dan perekonomian Hong Kong. Hal ini lah yang akan diteliti oleh peneliti.

c) Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan didalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder yaitu studi pustaka yang ditemukan dalam buku, jurnal, data internet serta tulisan – tulisan lainnya yang relevan dan

mendukung penelitian ini. Sehingga data – data yang didapat akan mendukung argument dan menjadi dasar penelitian yang diteliti.

d) Proses Penelitian

Dalam proses pengumpulan data, data akan diperoleh dari data – data seperti jurnal, buku, website resmi serta tulisan – tulisan lainnya. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dan diteliti kedalam rumusan masalah yang dibahas sehingga didapatkan kesimpulan yang relevan dengan studi Hubungan Internasional.



BAB II

PENERAPAN “ONE COUNTRY, TWO SYSTEM” DI HONG KONG OLEH TIONGKOK MEMPENGARUHI PEREKONOMIAN HONG KONG

2.1 Latar Belakang Tiongkok Mempertahankan Hong Kong

Di bawah formula “One Country, Two System” yang disepakati sebagai bagian dari penyerahan wilayah Inggris ke Tiongkok, Hong Kong dijamin kebebasan yang berbeda dengan Tiongkok daratan seperti kebebasan berekspresi dan peradilan yang independen. Kebebasan ini memberi Hong Kong hak istimewa dalam status internasional, sehingga dapat melakukan perundingan perjanjian perdagangan dan investasi secara independen berbeda dengan Beijing. Contohnya seperti tidak harus membayar tarif yang diberlakukan Amerika Serikat pada impor Tiongkok. Hal ini membuat investor asing lebih percaya pada hukum yang ada di Hong Kong. Sejak Hong Kong diserahkan kepada Tiongkok pada tahun 1997, Tiongkok telah mengembangkan kepentingan ekonomi dan bisnis besar-besaran di wilayah tersebut. Pimpinan Tiongkok menyadari bahwa Tiongkok masih membutuhkan Hong Kong yang memiliki sistem ekonomi kapitalis (Harding, 1993).

Tiongkok memiliki beberapa alasan untuk mempertahankan Hong Kong sebagai bagian dari mereka. Salah satunya yaitu adalah alasan ekonomi. Hong Kong menjadi wilayah yang memiliki fungsi sebagai pusat untuk mengumpulkan mata uang asing terutama obligasi dalam mata uang

dolar AS. Selain itu, perusahaan di Tiongkok menjadikan Hong Kong sebagai sumber utama pendanaan asing bagi mereka. Hong Kong juga menjadi pintu gerbang di mana investor Barat dapat mengakses pasar saham Tiongkok daratan. Hal ini dapat dibuktikan dengan posisi Hong Kong yang memiliki pasar saham terbesar keempat di dunia. Mata uang yang ada di Hong Kong juga menjadi jembatan bagi perusahaan Tiongkok yang ingin berinvestasi di luar negeri. Hong Kong merupakan sumber modal terbesar bagi perusahaan Tiongkok yang mencari investasi luar negeri melalui penawaran umum perdana. Salah satu kelebihan Hong Kong adalah, Hong Kong memiliki pasar utang dalam mata uang dolar dan likuid (aset) yang dalam. Hal ini dimanfaatkan oleh Tiongkok yang ingin meningkatkan mata uang asing dengan menjual obligasi dolar AS atau menarik investor luar. Hal ini membuat Hong Kong menjadi pusat luar negeri terbesar untuk penjualan obligasi oleh perusahaan Tiongkok (Harding, 1993).

Tiongkok memiliki cita – cita untuk menjadi bangsa yang besar dimana mereka ingin mewujudkan “The Greater China”. Arti sebenarnya dari "The Greater China" mengacu pada interaksi yang meningkat pesat di antara masyarakat Tionghoa di seluruh dunia karena hambatan politik dan administratif untuk hubungan mereka yang jatuh. Namun ada juga yang mengatakan bahwa hal ini merujuk terutama pada ikatan komersial di antara etnis Tionghoa, sedangkan yang lain lebih tertarik pada interaksi budaya, dan yang lainnya pada prospek penyatuan kembali politik. Beberapa pengamat memfokuskan secara eksklusif pada Hong Kong, Makau, Taiwan, dan Tiongkok daratan, yang lain memasukkan Singapura, dan yang lainnya

termasuk orang Tiongkok perantauan yang tinggal di Asia Tenggara, Amerika, dan Eropa. Bagi beberapa penulis, "Greater China" merupakan cara untuk meringkas hubungan baru antara komunitas Tiongkok internasional yang berjauhan. Sehingga, Tiongkok ingin Hong Kong tetap berada dibawah Tiongkok karena mereka menganggap Hong Kong adalah bagian dari mereka. Yang lebih penting, "Greater China" adalah konsep yang kontroversial karena dalam konsepnya, proses yang dilakukan tak terhindarkan dan tidak dapat diubah. Kebangkitan berbagai hubungan ekonomi dan budaya yang telah lama dibatasi oleh sistem politik (Harding, 1993).

2.2 Peran “One Country, Two System” dalam Politik Hong Kong

Ketika Hong Kong dikembalikan ke Tiongkok, hal ini menjadi perhatian bagi dunia. Setelah penyerahan ini dilakukan tidak banyak hal yang terjadi antara Tiongkok dan Hong Kong. Sebelum penyerahan Hong Kong kepada Tiongkok tahun 1997, kebijakan “One Country, Two System” dibentuk untuk mencapai tujuan bagi Hong Kong dan Tiongkok. Tujuannya yaitu untuk melestarikan Hong Kong yang makmur dan juga untuk mengamankan kepentingan nasional Tiongkok yang lebih luas dalam kedaulatan teritorialnya. Kemudian dibentuk sebuah ide dan kebijakan tersebut yaitu Undang-Undang Dasar Daerah Administratif Khusus (SAR) Hong Kong yang dibentuk tahun 1990 yang berisi, mematuhi satu negara dan menjaga kedaulatan, menjunjung tinggi sistem yang tidak berubah dan menjaga stabilitas dan kemakmuran (Yeung, 2001).

Ada tiga strategi yang mengatur formula ini. yang pertama yaitu, hukum dasar Hong Kong mengikat SAR dan Tiongkok tersebut diberlakukan untuk memisahkan kedua sistem. Dibawah konstitusi mini ini, SAR dapat menangani masalah dalam negeri dengan otonomi tingkat tinggi. Sementara itu, Beijing memiliki peran dalam mempertahankan kekuasaan dalam pertahanan dan urusan luar negeri. Kemudian yang kedua, adanya pendekatan dalam menciptakan konsep “One Country” ini. “One Country” dilambangkan dengan bendera dan lambang baru, peran Beijing yaitu pengangkatan kepala eksekutif SAR dan pejabat utama yang lainnya. Ketiga, adanya pemahaman dan pengakuan toleransi ketika ada perbedaan yang mungkin dapat hadir antara kedua sistem dalam menangani masalah (Yeung, 2001).

Terjadinya protes Lapangan Tiananmen tanggal 4 Juni tahun 1989 membuat pola pikir para pemimpin Tiongkok berubah. Dengan adanya protes massa di Hong Kong, Pemimpin Tiongkok memasukkan ketentuan dalam Basic Law untuk melindungi daratan dari ancaman subversif (rencana menjatuhkan kekuasaan yang sah dengan menggunakan cara di luar undang-undang) dari Hong Kong, yang dikenal sebagai Pasal 23. Selain itu, kepercayaan domestik Hong Kong di Beijing hancur. Dengan tindakan keras Tiongkok dalam protes Tiananmen ini menimbulkan kesadaran rakyat yang pesimis berpendapat bahwa rezim komunis pada dasarnya otoriter yang menuntut kendali yang mutlak. Mereka dianggap tidak menyukai nilai-nilai Barat, atau norma-norma hak sipil dan kebebasan yang diterima

secara internasional, juga tidak memiliki pers bebas atau mekanisme untuk check and balances pemerintah (Yeung, 2001).

Kaum konservatif Partai Komunis menganggap pengaruh borjuis Barat dari Hong Kong sebagai ancaman bagi pemerintahan komunis. Maka, secara langsung atau tidak langsung, SAR akan mencoba membatasi otonomi SAR dan memonopoli kontrol de facto atas Hong Kong. Rasionalisme ekonomi telah berlaku di Tiongkok sejak kebijakan “open door policy” 1979 dan telah memperluas lingkup kehidupan politik dan sosial. Mereka menekankan bahwa Hong Kong yang makmur dan stabil dianggap akan memainkan peran penting dalam gerakan modernisasi Tiongkok yang berfungsi sebagai jendela untuk memahami seluruh dunia, membantu menyerap modal asing, dan memberikan pengetahuan ekonomi dan keuangan (Yeung, 2001).

Pasca Hong Kong dikembalikan kepada Beijing tahun 1997, prinsip “One Country, Two System” telah memberi Hong Kong keunggulan dalam persaingan ekonomi global, penyatuan kembali dengan Tiongkok Daratan juga telah membawa konflik yang berulang mengenai seputar mobilitas Tiongkok Daratan melintasi perbatasan. Salah satu perjuangan paling kontroversial yaitu tentang hak tinggal muncul secara praktis setelah kembalinya Hong Kong ke China pada 1 Juli 1997. Undang-Undang Dasar, yang mulai berlaku pada tanggal serah terima, menjamin hak tinggal bagi semua orang yang lahir dari penduduk Hong Kong terlepas dari tempat lahir mereka (LEUNG, 2015).

Selain itu, selama dua dekade setelah penyerahan Hong Kong ke Tiongkok, banyak pengamat, akademisi, dan jurnalis sepakat bahwa kebebasan pers di Hong Kong telah menurun seiring berjalannya waktu. Namun, kebebasan pers tidak sepenuhnya hilang begitu saja. Freedom House menilai pers Hong Kong sebagai "sebagian bebas" pada tahun 2017. Berbeda dengan Tiongkok daratan, tidak ada sistem sensor pra-publikasi pemerintah. Ada negosiasi berkelanjutan antara media dan kekuatan politik dan perlawanan jurnalistik dalam organisasi media. Perubahan ekonomi politik media berita Hong Kong dalam dua dekade pertama setelah penyerahan. Media arus utama tetap tertanam kuat dalam jaringan hubungan bisnis negara. Seperti 20 tahun lalu, banyak pemilik media adalah pebisnis yang memiliki kepentingan luas di daratan. Tarik menarik antara tekanan politik dan profesionalisme jurnalistik bertahan hingga saat ini dan kemungkinan besar akan terus berlanjut.

Kemudian dalam bidang struktur ekonomi politik tidak tetap dan tidak bergerak. Karena perubahan sosial dan teknologi, bisnis media menghadapi tantangan yang sangat besar. Biaya peluang menjalankan organisasi media Hong Kong telah meningkat, sehingga semakin mengurangi insentif bagi para pebisnis Hong Kong untuk memiliki organisasi media. Perkembangan tersebut telah membuka jalan bagi masuknya ibukota Tiongkok ke kancah media Hong Kong. Penurunan kebebasan pers di Hong Kong dari perspektif ekonomi politik. Judul laporan tahunan Hong Kong Journalists Association (HKJA) dalam dekade terakhir

secara teratur mengungkapkan keprihatinan tentang ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan pers (LEE, 2018).

Selama masa transisi ke 1997, Hong Kong dipenuhi dengan segala macam prediksi " pesimisme politik, optimisme ekonomi " (Chan dan Lin, 2008). Ada "pesimisme politik" karena memang ada kekhawatiran yang mendalam tentang pemberlakuan pemerintahan komunis di Hong Kong, orang-orang begitu khawatir sehingga mereka ingin keluar dari Hong Kong sebelum komunis datang pada tahun 1997. Gerakan perlawanan yang kuat dalam bentuk protes demokratisasi terus berlanjut. Di sisi lain, ada 'optimisme ekonomi' karena ekonomi Hong Kong berjalan sangat baik selama masa transisi (1984 - 1997), akibat relokasi industri melintasi perbatasan yang berfungsi untuk memperkuat ekonomi. Pasokan tenaga kerja murah yang melimpah dan pasar daratan yang besar dan berkembang telah sangat meningkatkan daya saing dan profitabilitas industri Hong Kong.

Beijing sebagian besar memenuhi janjinya untuk "One Country, Two System" mengadopsi posisi non-campur tangan terhadap urusan Hong Kong dan memungkinkan otonomi tingkat tinggi. Sementara para demokrat di Hong Kong takut mereka akan dimasukkan ke dalam penjara ketika komunis mengambil alih setelah 1997. Faktanya, para demokrat diizinkan untuk menyuarakan pandangan mereka dengan bebas (termasuk kecaman terhadap penindasan berdarah Partai Komunis di Lapangan Tiananmen). Dalam pemerintahan SAR baru Hong Kong, protes anti-komunis (seperti

yang diorganisir oleh Falun Gong) diizinkan, media massa tetap bebas (Ma, 2007), dan ada 3 pemilihan umum yang demokratis setelah 1997 (So, 2001).

Ekonomi Hong Kong berada dalam kondisi yang sangat buruk setelah penyerahan tahun 1997. Penurunan ekonomi Hong Kong disebabkan oleh krisis keuangan Asia daripada transisi tahun 1997. Pada puncak krisis Asia pada tahun 1998, produk domestik bruto (PDB) Hong Kong menyusut sekitar 5% (dibandingkan dengan pertumbuhan nyata 5,2% pada tahun 1997), harga properti turun secara mengejutkan sebesar 50% dan harga pasar saham turun drastis. Pengangguran mencapai rekor tertinggi 6%, upah turun, banyak bisnis tutup dan permintaan konsumen lemah (Lui, 2002). Selama periode kemerosotan ekonomi (1997-2003) ini, pemerintah SAR enggan mendorong integrasi ekonomi yang lebih besar dengan Tiongkok daratan karena Partai Demokrat, yang sangat populer di akhir 1990-an, menginginkan pemerintah SAR meminimalkan proses integratif untuk melestarikan "kekhasan" Hong Kong. Partai Demokrat berasumsi bahwa lebih banyak integrasi akan mengubah Hong Kong menjadi kota Tiongkok lainnya, seperti Kanton dan Shanghai. Ia berpendapat bahwa Hong Kong harus menjaga kekhasannya, terutama pemilihan demokratis, masyarakat sipil yang bebas, kemandirian peradilan dan kebebasan terkait, untuk mempertahankan status "kota global" (Loh, 2006). Sejak Beijing mengambil posisi non-campur tangan dan mengizinkan Hong Kong memiliki otonomi dan kemerdekaan, tampaknya kebijakan "One Country, Two System" berjalan lancar di Hong Kong ketika mulai bergeser dari "One Country" ke "Two System" (SO, "One Country, Two Systems" and Hong

Kong-China National Integration: A Crisis-Transformation Perspective, 2011).

2.3 Perekonomian Hong Kong dibawah “One Country, Two System” Sebelum dan Pasca Krisis Ekonomi 2008

Perekonomian Hong Kong melewati berbagai macam masalah yang menyebabkan Hong Kong harus tetap bertahan. Hong Kong melalui Asian Financial Crisis pada tahun 1997 yang mendorong Hong Kong untuk tetap bertahan dibawah pengaruh pemerintahan Tiongkok Daratan, kemudian Krisis Ekonomi dunia yang terjadi tahun 2008 juga mendorong Hong Kong untuk mempertahankan posisinya sebagai wilayah dengan perekonomian terbaik. Secara ekonomi, Hong Kong masih menjadi pusat keuangan internasional utama dan pintu gerbang utama ke Tiongkok. Namun, interaksi ekonomi Hong Kong dengan daratan Tiongkok telah tumbuh lebih dalam dan lebih luas selama 10 tahun terakhir dari yang diharapkan, meningkatkan hubungan ekonomi kota dengan Tiongkok. Hubungan yang lebih dekat dengan daratan ini diperkuat dengan penandatanganan perjanjian perdagangan bebas pada tahun 2003, yang disebut “Pengaturan Kemitraan Ekonomi Lebih Dekat,” atau CEPA, antara Tiongkok dan Hong Kong. Dinamika ekonomi dan perdagangan saat ini telah menimbulkan kekhawatiran bahwa hubungan Hong Kong dengan Tiongkok akan bergeser dalam jangka panjang dari salah satu sinergi menjadi integrasi penuh, yang mungkin merusak “otonomi tingkat tinggi” HKSAR (Martin, 2007).

Sebelum Krisis Ekonomi 2008 terjadi, sepuluh tahun telah berlalu sejak pembentukan Daerah Administratif Khusus Hong Kong, atau

HKSAR, pada 1 Juli 1997. Peristiwa tersebut, biasanya disebut sebagai Serah Terima, menandai berakhirnya 155 tahun pemerintahan kolonial Inggris dan dimulainya kembali pemerintahan kedaulatan atas Hong Kong. Selama 10 tahun terakhir, telah terjadi sedikit perubahan dalam situasi politik Hong Kong dan perubahan yang lebih signifikan dalam ekonominya. Perubahan politik dan ekonomi ini berdampak pada identitas sosial dan budaya Hong Kong. Meskipun beberapa politik dan kemunduran ekonomi, HKSAR tetap menjadi pusat perdagangan internasional yang dinamis di Asia (Martin, 2007).

Setelah 1997, ekonomi Hong Kong mengalami serangkaian guncangan eksternal yang memicu dan memperpanjang resesi. Krisis Keuangan Asia tahun 1997, yang dimulai hampir bersamaan dengan Penyerahan, memiliki efek riak di Hong Kong, mengakibatkan penataan kembali nilai aset utama, harga komoditas dan deflasi upah, dan penurunan produk domestik bruto (PDB) kota. Pemulihan ekonomi Hong Kong kemudian ditunda oleh pecahnya Sindrom Pernafasan Akut Parah, atau SARS, pada awal tahun 2003. Namun, sejak berakhirnya wabah SARS, ekonomi Hong Kong telah pulih, sebagian karena hubungan perdagangan yang semakin dalam dengan daratan Tiongkok. Krisis Keuangan Asia dan SARS terjadi hampir bersamaan dengan upacara Serah Terima yang diadakan di Pusat Konvensi dan Pameran Hong Kong, Krisis Keuangan Asia melanda banyak perekonomian di Asia Tenggara. Krisis dengan cepat menyebar ke sebagian besar Asia Timur dan pada akhir tahun 1997, sebagian besar mata uang Asia telah mengalami kerugian nilai yang

signifikan sehubungan dengan dolar AS, mulai dari penurunan 13% untuk yen Jepang hingga penurunan 55% untuk Rupiah. Namun, dua mata uang Asia - renminbi China dan dolar Hong Kong tidak mengalami penurunan nilai yang sama karena kaitannya dengan dolar AS (Martin, 2007).

Pemulihan Hong Kong dari guncangan eksternal dari Krisis Keuangan Asia mengalami pertumbuhan ekonomi riil antara tahun 2001 dan 2003, harga domestik terus turun dan tingkat pengangguran terus meningkat. Kurangnya kepercayaan pada komunitas bisnis Hong Kong dan turis di jalanan mengakibatkan penutupan banyak perusahaan dan toko ritel di seluruh Hong Kong. Hong Kong kemudian diserang oleh eksternal ketiga yaitu Sindrom Pernafasan Akut Parah, atau SARS. Pandemi ini terjadi antara November 2002 dan Juli 2003, 299 orang di Hong Kong meninggal karena SARS. Bagi Hong Kong, SARS berdampak ganda terhadap perekonomian. Pertama, secara signifikan mengurangi pariwisata, terutama kedatangan dari Amerika Serikat dan Eropa Barat. Kedua, banyak penduduk Hong Kong takut meninggalkan rumah karena takut terinfeksi. Akibatnya, restoran, hotel, toko ritel, dan industri jasa lokal lainnya di Hong Kong mengalami penurunan tajam dalam bisnis (Martin, 2007).

Selain itu, pada tanggal 1 Januari 2004, Tiongkok dan Hong Kong membuat perjanjian perdagangan bebas yang mulai berlaku. "The Closer Economic Partnership Arrangement," atau dikenal sebagai CEPA, memberikan perusahaan Hong Kong akses preferensial ke pasar daratan Tiongkok. CEPA menghapus tarif impor untuk lebih dari 1.400 jenis produk Hong Kong, yang mewakili sekitar 90% dari ekspor domestik Hong Kong

ke Tiongkok. CEPA juga memberi penyedia layanan Hong Kong akses yang lebih mudah ke pasar daratan. Selain resesi berkepanjangan Hong Kong dan pemulihan, dilakukannya pendalaman dan perluasan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan Tiongkok daratan. Hal ini terjadi karena kondisi pasar global, tetapi juga karena Closer Economic Partnership Arrangement (CEPA) antara Hong Kong dan daratan Tiongkok, dan skema Kunjungan Perorangan, kebijakan pariwisata baru untuk pengunjung daratan ke Hong Kong, diperkenalkan oleh pemerintah Tiongkok pada tanggal 28 Juli 2003. Menurut beberapa pengamat, Hong Kong telah menjadi pusat dari kawasan ekonomi Pan-Pearl River Delta yang merupakan salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi dan perdagangan Tiongkok yang tinggi. Hong Kong memiliki kemampuan untuk menciptakan kembali dirinya sendiri setelah guncangan ekonomi yang parah. Akibatnya, perekonomian Hong Kong pada tahun 2007 sangat berbeda dengan pada tahun 1997. Meskipun sebagian besar perubahan tampak membaik, ada beberapa perkembangan yang mungkin menandakan masalah di masa depan (Martin, 2007).

Dampak yang diterima dari CEPA di Hong Kong sangat kuat. Kehadiran turis daratan di Hong Kong membawa keuntungan bagi hotel, ritel, restoran, dan industri manufaktur Hong Kong yang sebelumnya sangat menurun. Banyak turis daratan berasal dari *nouveau riche* China, menghabiskan uang di hotel, restoran, dan toko ritel berkualitas tinggi. Namun, masuknya turis dari daratan berarti juga masuknya sejumlah besar renminbi dan tekanan pada sektor jasa Hong Kong untuk mempelajari

bahasa bisnis ketiga Putonghua atau Mandarin. Akibatnya, Hong Kong menjadi lebih terbiasa untuk berbisnis di renminbi dan dalam bahasa Mandarin. Menyusul berakhirnya wabah SARS dan masuknya IVS, ekonomi Hong Kong telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat selama beberapa tahun. PDB riil Hong Kong tumbuh pada tingkat yang sebanding dengan periode ekspansi terakhir sebelum Penyerahan. Deflasi harga selama enam tahun berakhir pada tahun 2005. Selain itu, tingkat pengangguran yang sangat tinggi di Hong Kong memuncak pada 7,9% pada tahun 2003 memulai penurunan bertahap sekitar 1% per tahun (Martin, 2007).

Tiga belas tahun yang lalu, Lehman Brothers, bank investasi AS terbesar keempat, mengajukan perlindungan kebangkrutan. Ini merupakan sebuah peristiwa penting dalam apa yang kemudian dikenal sebagai krisis keuangan global (GFC). Bahkan satu dekade kemudian, kerusakan besar yang ditimbulkannya di seluruh dunia terus mempengaruhi ekonomi global dan perilaku investor. Financial Crisis yang terjadi tahun 2008 ini memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian banyak negara didunia termasuk Hong Kong.

Kegiatan ekonomi di Hong Kong melambat terutama pada paruh kedua tahun 2008 sebagai akibat dari krisis keuangan global dan penurunan di antara mitra dagang utama Hong Kong. Tekanan inflasi mereda menyusul melemahnya permintaan domestik dan kenaikan harga pangan dan biaya sewa yang lebih kecil. Pengangguran meningkat menjelang akhir tahun. Dengan masih berlangsungnya dampak krisis keuangan global pada sektor

riil, serta kedalaman dan lamanya resesi di negara industri utama yang tidak menentu, terdapat risiko yang signifikan terhadap prospek ekonomi hingga tahun 2009 (Economic and Banking Environment, 2008).

Ekspansi ekonomi yang kuat selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan PDB riil melambat tajam pada tahun 2008 karena ekonomi domestik dilanda krisis keuangan global. Untuk tahun 2008 secara keseluruhan, pertumbuhan PDB riil (nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi) moderat menjadi 2,5% dari 6,4% pada tahun 2007, yang mencerminkan permintaan domestik yang lebih lemah dan perlambatan pertumbuhan ekspor. Kondisi pasar tenaga kerja memburuk karena pemilik bisnis berada di lingkungan ekonomi yang memburuk. Tingkat pengangguran naik ke level tertinggi 16 bulan di 4.1% di bulan Desember dari 3.2% di bulan Juli. Tekanan inflasi mereda karena penurunan harga pangan dan komoditas menyeret turunnya inflasi harga impor. Penurunan harga properti di paruh kedua juga membantu meringankan tekanan biaya sewa (Economic and Banking Environment, 2008).

Gejolak di pasar keuangan global yang disebabkan oleh ambruknya pasar subprime mortgage di AS mengakibatkan kondisi perkreditan di Hong Kong semakin ketat. Suku bunga untuk pinjaman antar bank naik pada bulan September dan Oktober sebelum turun secara bertahap menjelang akhir tahun 2008. Secara triwulanan, pertumbuhan kredit domestik berubah negatif menjadi -3,5% pada triwulan keempat tahun 2008 dari 2,7% pada triwulan ketiga. kuartal, sebagian mencerminkan pinjaman bank yang lebih konservatif. Sementara itu, pertumbuhan uang tunai dolar Hong Kong

meningkat menjadi 2,9% dari 2,6%. Dengan kredit domestik menyusut dan uang berkembang luas, rasio pinjaman terhadap simpanan dolar Hong Kong turun menjadi 77,6% pada Desember dari level tertinggi hampir tiga tahun di 83,8% pada Agustus 2008 (Economic and Banking Environment, 2008).



BAB III

PEREKONOMIAN HONG KONG DIBAWAH “ONE COUNTRY, TWO SYSTEM” DAN TIONGGOK

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai bagaimana politik perekonomian Hongkong dan hubungannya dengan Tiongkok. Hubungan kedua aktor ini membangun sebuah ketergantungan yang saling menguntungkan masing – masing pihak. Tiongkok maupun Hongkong memiliki tujuan negara sendiri untuk mencapai kepentingan masing – masing. Dalam bab sebelumnya juga sudah terlihat bagaimana Tiongkok membutuhkan Hongkong untuk membangun perekonomian mereka serta untuk obligasi dolar AS. Hongkong sebagai wilayah yang dikenal dengan pusat keuangan dunia tentu saja akan menguntungkan Tiongkok dalam hal ekonomi dan sebagai pintu utama perekonomian bebas yang masuk ke wilayah Tiongkok.

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis isu tersebut dengan menggunakan asumsi Teori Interdependensi Kompleks yaitu *Multiple Channels*, yang berdasarkan teori interdependensi kompleks memiliki makna adanya hubungan yang saling bergantung satu sama lain sehingga dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua yaitu *Multiple Issues*, yang memiliki arti bahwa setiap aktor dalam hal ini yaitu Tiongkok dan Hongkong memiliki tujuan yang berbeda. Yang terakhir yaitu, *The Role of Force* tidak ada digunakan karena dianggap tidak efektif.

Hal ini juga dikarenakan Hubungan Tiongkok dan Hongkong lebih mengutamakan perluasan hubungan ekonomi dan industrialisasi.

3.1 Implikasi Kebijakan “One Country, Two System” (The Role of Force)

“One Country, Two System” merupakan sebuah sistem yang dibentuk oleh pihak Tiongkok untuk tetap mempertahankan Hong Kong. Pada tahun 1997, Inggris mengembalikan Hong Kong ke Tiongkok setelah memerintahnya sebagai koloni selama satu setengah abad, Tiongkok membentuk sebuah pemerintahan sementara yang dikenal sebagai prinsip "One Country, Two System". Tiongkok memberikan janji kepada Hongkong bahwa kebijakan sosialis Tiongkok tidak akan dipraktikkan di wilayah administratif khusus Hongkong, sistem dan cara hidup Hong Kong sebelumnya tidak akan berubah selama 50 tahun. Dalam kasus "One Country, Two System", Tiongkok jelas memiliki tujuan untuk menggabungkan Hong Kong ke dalam gambaran nasional dan pada saat yang sama mempertahankan karakteristik individualnya. Hal ini menandakan bahwa, dalam penyelesaian masalah ini, Tiongkok tidak menggunakan kekuatan militer dalam penyelesaian isu mereka. Seperti yang dijelaskan oleh Keohane, Role of Force tidak relevan dalam isu ini dikarenakan terdapat ketergantungan yang terjadi yang telah di jelaskan dalam bab II.

Pemerintah Beijing menjunjung tinggi kebijakan “One Country, Two System” dan memutuskan untuk tidak mencampuri urusan Hong Kong. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi mengembalikan Hong Kong

secara damai dengan transisi yang dilakukan secara perlahan, dan kemudian menggunakannya sebagai model untuk menunjukkan kemungkinan reunifikasi dengan Taiwan. Selama dan setelah menjadi koloni Inggris, Hong Kong masih terintegrasi erat dengan Tiongkok secara sosial dan ekonomi (Anastasia Yip, 2015). Dalam situasi ini, militer dianggap tidak akan signifikan dalam menyelesaikan sebuah isu.

Kebijakan “One Country, Two System” merupakan kebijakan nasional dasar yang diadopsi oleh Pemerintah Republik Rakyat China (RRC) dalam menangani hal-hal yang terkait dengan Hong Kong dan Kawasan Administratif Khusus (SAR) Makau. Sejak 1980-an, istilah politik “One Country, Two System” mulai muncul di media Tiongkok dan dunia. Evolusi dari kebijakan “One Country, Two System” dan komponen dasarnya telah menunjukkan bahwa sistem ini merupakan kebijakan yang didasarkan pada faktor sejarah. Sistem ini juga merupakan kebijakan nasional dasar yang diusulkan oleh kepemimpinan Partai Komunis China (PKC), Hal ini adalah kebijakan dengan ciri khas Tiongkok (Tiexun, On the Fundamental Characteristics of the “One Country, Two Systems” Policy, 2011).

Kebijakan “One Country, Two System” memiliki unsur-unsur utama sebagai berikut:

1. Hong Kong dapat memisahkan sistem kapitalisnya dari sistem komunis di daratan, sehingga kebijakan tersebut dinamakan “Satu Negara, Dua Sistem”.

2. Hong Kong akan memiliki otonomi yang tinggi dalam menjalankan urusan ekonomi, budaya, dan politiknya. Hong Kong bahkan dapat memiliki polisi dan angkatan bersenjata sendiri, mata uang, kebiasaan sosial kapitalisnya dan institusi. Hong Kong akan memiliki hukum dan pengadilannya sendiri. Hukum dan peraturan daratan tidak akan diterapkan di Hong Kong. Beijing dan pemerintah lokal lainnya di daratan tidak akan mencampuri urusan Hong Kong kecuali yang menyangkut diplomasi luar negeri.
3. Orang Hong Kong memerintah Hong Kong (gangren zhigang). Pemerintah Hong Kong akan dipilih oleh rakyat Hong Kong, Beijing tidak akan mengirimkan pejabat apapun untuk menjalankan pemerintahan Hong Kong.
4. “One Country, Two Systems” akan tetap tidak berubah selama 50 tahun setelah daratan mengembalikan kedaulatan Hong Kong pada tahun 1997.

Hong Kong dibentuk sebagai hasil dari tiga Perjanjian antara Inggris Raya dan Dinasti Qing di Tiongkok. Ketiga Perjanjian tersebut adalah:

A. Perjanjian Nanjing yang ditandatangani pada tahun 1842, pada akhir Perang Candu Pertama, di mana pemerintah Cina memberikan Hong Kong kepada Inggris Raya.

b. Konvensi Pertama Beijing. Ini terjadi pada tahun 1860 setelah Perang Panah, di mana pada saat itu China memberikan lebih banyak wilayah kepada Inggris, seperti Pulau Stonecutter, dan Semenanjung Kowloon.

c. Konvensi Kedua Beijing, yang berlangsung pada tahun 1898, di mana Wilayah Baru juga diberikan kepada Inggris.

"One country, two systems" adalah kebijakan dasar negara yang diadopsi pemerintah Tiongkok untuk mewujudkan reunifikasi damai negara tersebut. Didalam prinsip ini, pemerintah Tiongkok berhasil menyelesaikan masalah Hong Kong melalui negosiasi diplomatik dengan pemerintah Inggris, dan melanjutkan pelaksanaan kedaulatan atas Hong Kong pada tanggal 1 Juli 1997, memenuhi aspirasi bersama rakyat Tiongkok untuk pemulihan Hong Kong. Hal ini memiliki hasil Hong Kong menyingkirkan kekuasaan kolonial dan kembali ke Tiongkok, dan memulai jalan luas pembangunan bersama dengan daratan, karena mereka saling melengkapi keunggulan satu sama lain. Kembalinya Hong Kong ke Tiongkok mengubah "One Country, Two System" dari konsep ilmiah menjadi sistem yang nyata. Pemerintah pusat berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar Hong Kong, dengan sungguh-sungguh menjalankan tugas konstitusionalnya dan berdiri teguh dalam mendukung administrasi kepala eksekutif dan pemerintahan Daerah Administratif Khusus Hong Kong (HKSAR) sesuai dengan hukum. HKSAR menjalankan otonomi tingkat tinggi sesuai dengan undang-undang, dan diberi wewenang eksekutif, legislatif dan peradilan independen, termasuk putusan akhir. Sistem dan cara hidup kapitalis sebelumnya tetap tidak berubah, dan sebagian besar hukum terus berlaku. Hong Kong terus makmur, masyarakatnya tetap stabil, dan perkembangan penuh disaksikan dalam semua upaya. Kebijakan "One

Country, Two System" menikmati popularitas yang semakin meningkat di Hong Kong, mendapatkan dukungan oleh komunitas internasional.

"One Country, Two System" adalah domain baru dimana mereka dapat terus mengeksplorasi kemungkinan baru dan membuat kemajuan baru. Ringkasan implementasi kebijakan di HKSAR, dan pemahaman serta implementasi kebijakan yang komprehensif dan benar akan terbukti berguna untuk melindungi kepentingan kedaulatan, keamanan dan pembangunan Tiongkok, untuk menjaga kemakmuran dan stabilitas jangka panjang di Hong Kong, dan untuk lebih mempromosikan "One Country, Two System" (The Practice of The "One Country, Two System" Policy in the Hong Kong Special Administrative Region, 2014)

Ketika kedaulatan Hong Kong kembali ke Tiongkok setelah 150 tahun pemerintahan kolonial Inggris, Tiongkok membentuk pemerintahan sementara mengikuti prinsip "One Country, Two System". Dimana didalam sistem ini berjanji bahwa sistem dan kebijakan sosialis Tiongkok tidak akan dipraktikkan di wilayah administratif khusus ini. Meskipun "One Country, Two System" menjamin bahwa sistem ekonomi dan politik Hong Kong tidak akan berubah selama 50 tahun setelah penyerahan Inggris pada tahun 1997, Dewan Urusan Daratan Republik Tiongkok telah mengutip 218 kasus antara tahun 1997 dan 2007 di mana mereka mengklaim RRT telah melanggar hak rakyat Hong Kong untuk memerintah sendiri dan sangat campur tangan dalam sistem peradilan serta kebebasan berbicara. Campur tangan Beijing meningkat selama bertahun-tahun tanpa memecahkan masalah identitas. Upaya Tiongkok untuk menerapkan agenda harmoni

Konfusianisme ke Hong Kong, di mana sebagian besar percaya pada supremasi hukum dan hak individu, dan kegagalannya untuk menghapus sistem politik kolonial top-down memperkenalkan Tiongkok sebagai orang luar (colonial).

Sebelum penyerahan, Hong Kong terlihat lebih sebagai koloni konsultatif. Hong Kong diperintah dari London melalui seorang gubernur. Dengan kata lain, mempertahankan sistem politik yang diciptakan di bawah kekuasaan Inggris membatasi Hong Kong pada hegemoni kolonial. Melihat bagaimana Undang-Undang Dasar gagal mengakhiri kekerasan struktural yang disebabkan oleh hierarki atas-bawah yang diwariskan dari masa kolonial selama 17 tahun terakhir, masyarakat Hong Kong menginginkan perubahan yang lebih radikal dan mengkritik dasar-dasar "One Country, Two System". Tiongkok saat ini semakin banyak masuk ikut campur terhadap kedaulatan Hong Kong. Hal ini juga akan mengancam perekonomian Hong Kong yang sebelumnya dapat lebih independent. Dikarenakan, krisis politik akan mempengaruhi perekonomian sebuah negara (Anastasia Yip, 2015).

Salah satu contoh kenapa ekonomi Hong Kong dirugikan adalah didalam CEPA, terlepas dari pengaturan preferensialnya, CEPA masih belum merupakan kesepakatan perdagangan timbal balik yang komprehensif dan ekonomi Hong Kong masih sangat terbuka sedangkan Tiongkok Daratan relatif tertutup. Masalah lain yang mungkin timbul dari integrasi ekonomi antara Daratan dan Hong Kong adalah bahwa adanya persaingan, bukannya melengkapinya namun hal ini dapat membawa Hong

Kong ke posisi dirugikan. Contoh lain yaitu dalam kerjasama ekonomi Pearl River Delta, Guangdong tidak sepenuhnya berharap untuk bergantung pada industri jasa Hong Kong dalam waktu dekat, mereka berharap dapat membangun, memodernisasi, dan menginternasionalkan industri jasanya sendiri dalam setengah dekade mendatang. Akibatnya, beberapa aktivitas layanan di Hong Kong mungkin diganti. Integrasi dengan ekonomi Tiongkok tidak akan menggantikan kebutuhan Hong Kong untuk menyelesaikan restrukturisasi ekonominya untuk membangun kembali daya saingnya dalam ekonomi global.

Sementara bantuan aktif dan didorong oleh kebijakan dan integrasi ekonomi Tiongkok telah membantu pemulihan ekonomi Hong Kong, hal itu juga memiliki konsekuensi negatif. Selain membuat Hong Kong lebih bergantung secara politik dan ekonomi pada Tiongkok, Tiongkok juga telah menutupi masalah sebenarnya dari struktur ekonominya dan oleh karena itu mengurangi insentif pembuat kebijakan untuk melaksanakan reformasi yang efektif, dan bahkan dapat menyesatkan perkembangan ekonomi Hong Kong ke arah yang salah. Misalnya, pemerintah HKSAR terlalu menekankan pada pengembangan industri jasa tersier, terutama pariwisata, dan membiarkan industri sekunder, terutama industri manufaktur semakin menyusut, yang mengarah pada perekonomian yang lebih terkonsentrasi dan tidak serasi. Bahkan pejabat Tiongkok di Beijing telah sering memperingatkan Hong Kong tentang ketergantungannya hanya pada beberapa sektor, membuatnya rentan dan sensitif terhadap risiko siklus ekonomi. Arus masuk uang yang besar ke

Hong Kong sejak krisis keuangan 2008 juga sangat meningkatkan risiko gelembung ekonomi. Ekonomi virtual yang didorong oleh gelembung-gelembung tersebut tidak menguntungkan ekonomi riil yang lebih relevan dengan mata pencaharian masyarakat umum dan bahkan berbahaya bagi ekonomi riil dalam jangka Panjang (YUEN, 2012).

3.1.1 Kebijakan “One Country, Two System” bagi Hong Kong

Dengan kembalinya Hong Kong pada 1997, pendekatan “One Country, Two System” telah sepenuhnya memvalidasi untuk bertahan. Hong Kong SAR telah terbukti menjadi contoh sukses dari penerapan kebijakan “One Country, Two System”. Namun ini tidak berarti akhir dari praktik dan eksplorasi yang berkelanjutan. Dalam upaya praktik kebijakan “One Country, Two System”, bertujuan untuk mencapai tingkat perkembangan dan evolusi yang lebih tinggi. Terlepas dari keberhasilannya secara keseluruhan, teori “One Country, Two System” juga memerlukan tinjauan dan pemeriksaan terhadap penerapan dan praktiknya. Undang-Undang Dasar SAR Hong Kong telah berhasil diterapkan selama lebih dari satu dekade sekarang. Namun, implementasi yang berhasil tidak selalu berjalan mulus dan menghadapi tantangan karena perselisihan yang muncul (Tiexun, On the Fundamental Characteristics of the “One Country, Two Systems” Policy, 2011).

Rakyat Hong Kong memiliki kebebasan terbatas di bawah pemerintahan kolonial, hak individu dan kebebasan yang ditetapkan dalam sistem hukum umum tetap bertahan sebagai nilai politik sentral rakyat Hong Kong. Ideologi ini sangat berbeda dari pemerintah Tiongkok di mana

Konfusianisme terletak pada inti dan kepentingan nasional menggantikan kepentingan pribadi dalam kebijakannya. Perbedaan ideologis ini mengasingkan orang Hong Kong dari Tiongkok. Masyarakat Hong Kong terbiasa dengan konsep hukum Inggris, gagasan mereka tentang pemerintahan yang efektif sangat mirip dengan yang diuraikan oleh Kant, di mana *“negara berdaulat harus melindungi hak asasi manusia seperti kebebasan, persamaan dan kemerdekaan individu,”* yang berarti bahwa mereka menginginkan kebebasan berbicara dan pers setelah kolonialisme berakhir (Anastasia Yip, 2015).

Pada awalnya, pemimpin Beijing yang memiliki pemahaman yang realistis dan akurat tentang Hong Kong terbiasa memandang dunia dari sudut pandang filsafat Marxis dan merasa pendapat mereka lebih baik tentang bagaimana cara terbaik untuk mengatur koloni kapitalis seperti Hong Kong. Hal ini membuat elit Hong Kong khawatir. Selanjutnya, rakyat Hong Kong juga tidak bisa ikut serta dalam negosiasi yang mempengaruhi nasibnya sendiri. Baik Inggris dan Tiongkok mengklaim bahwa mereka mewakili kepentingan rakyat Hong Kong, tetapi pada kenyataannya mereka terlalu terwakili di beberapa daerah dan tidak cukup terwakili di daerah lain (Weng, 1987/1988).

Rakyat Hong Kong kemudian diingatkan oleh Tiongkok daratan bahwa Inggris akan mengembalikan otoritas kedaulatan atas Hong Kong ke RRC, bukan kepada mereka. Pemerintahan HKSAR di masa depan akan langsung berada di bawah pemerintah pusat. Kekuatannya akan datang dari otorisasi National People's Congress (NPC), bukan dari rakyat Hong Kong.

Kemudian Beijing telah berjanji, HKSAR akan memiliki otonom tinggi atas pemerintahannya di mana rakyat Hong Kong akan memerintah Hong Kong. Namun, proses penyusunan dan draf pasal-pasal Undang-Undang Dasar telah menunjukkan bahwa para penguasa Beijing tidak berniat untuk menciptakan SAR yang dikelola secara otonom di Hong Kong (Weng, 1987/1988).

Mengenai Rancangan Undang-Undang Dasar, poin-poin berikut ini menunjukkan adanya potensi kendali atau campur tangan pusat dalam urusan HKSAR, bertentangan dengan janji otonomi tingkat tinggi.

1. Ketua Pelaksana HKSAR diangkat oleh Pemerintah Pusat berdasarkan hasil pemilihan atau musyawarah (belum diputuskan) yang akan diadakan di daerah. Pejabat utama dari berbagai departemen pada otoritas pelaksana HKSAR diangkat oleh pemerintah pusat setelah dicalonkan oleh kepala eksekutif.
2. Kepala eksekutif harus "bertanggung jawab kepada pemerintah pusat dan HKSAR serta melaksanakan instruksi yang diberikan oleh pemerintah pusat tentang hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini".
3. Kepala eksekutif memiliki kekuasaan untuk membubarkan badan legislatif dengan persetujuan pemerintah pusat.
4. Badan legislatif HKSAR dapat bergerak untuk memakzulkan kepala eksekutif hanya atas dua alasan: pelanggaran hukum yang serius atau kelalaian tugas. Prosedur pemakzulan mengharuskan sepertiga dari semua

anggota memindahkannya dan tiga perempat dari semua anggota menyetujuinya.

5. Undang-undang yang diberlakukan oleh badan legislatif HKSAR harus dilaporkan kepada komite tetap NPC (National People's Congress) untuk dicatat, dan jika komite tersebut menganggap bahwa undang-undang tersebut "tidak sesuai dengan undang-undang atau prosedur hukum ini, komite tersebut dapat mengembalikannya untuk dipertimbangkan kembali atau mencabutnya."
6. "Kekuatan interpretasi Basic Law akan diberikan pada komite tetap NPC." Interpretasi seperti itu mengikat pengadilan HKSAR. Pengadilan ini hanya dapat menafsirkan pasal-pasal dalam Undang-undang Dasar yang berada dalam lingkup otonomi SAR dan hanya dalam kasus-kasus yang mengadili.
7. Tiga badan komite tetap NPC, dewan negara, dan HKSAR memiliki kewenangan untuk mengusulkan amandemen Undang-Undang Dasar. "Proposal amandemen dari HKSAR akan diajukan ke NPC oleh delegasi HKSAR ke NPC setelah mendapat persetujuan dari tidak kurang dari dua pertiga anggota legislatif HKSAR dan ketua eksekutif HKSAR." Pemilihan delegasi HKSAR ke NPC merupakan urusan pemerintah pusat.
8. Komite Hukum Dasar HKSAR yang terdiri dari Hong Kong dan anggota daratan akan dibentuk di bawah komite tetap NPC.
9. Meskipun undang-undang RRT dengan pengecualian tertentu tidak boleh diterapkan di HKSAR, Dewan Negara memiliki kewenangan untuk

menerapkan "undang-undang di luar lingkup otonomi tingkat tinggi HKSAR" melalui proklamasi.

10. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas urusan luar negeri dan pertahanan HKSAR serta membentuk kantor-kantor yang diperlukan dan mengirimkan pasukan ke HKSAR. Pemerintah HKSAR memiliki kewenangan terbatas dalam urusan luar negeri yang bersifat ekonomi dan budaya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar (Weng, 1987/1988).

3.1.2 Kebijakan “One Country, Two System” dengan Karakteristik

Tiongkok

Kebijakan “One Country, Two System” merupakan kebijakan yang dibentuk oleh Tiongkok untuk reunifikasi Tiongkok daratan dan Hong Kong. Kebijakan ini tentu saja akan mewakili Tiongkok sepenuhnya karena kebijakan ini dibentuk oleh Deng Xiaoping. Konsep "One, Country, Two System" merupakan bagian penting dari sosialisme dengan karakteristik Tiongkok. Konsep ini berkembang dalam sistem sosialis dengan ciri-ciri Tionghoa, dan telah berperan aktif dalam membangun dan memajukan sosialisme dengan ciri Tionghoa. Di sisi lain, kebijakan “One Country, Two System” diusulkan seluruhnya atas dasar realitas Tiongkok guna menyelesaikan masalah Taiwan, didasarkan pada realitas kondisi masing-masing di kedua sisi Selat Taiwan dan situasi internasional. Deng Xiaoping dengan tegas mengusulkan agar Taiwan dapat mempertahankan sistem kapitalis dan cara hidup yang ada setelah reunifikasi dan bahwa pendekatan ini juga dapat diterapkan dalam menyelesaikan masalah Hong Kong dan

Makau (Tiexun, On the Fundamental Characteristics of the “One Country, Two Systems” Policy, 2011).

Kebijakan “One Country, Two System” juga kondusif bagi perkembangan Tiongkok di bawah sosialisme bercirikan Tiongkok. Untuk Tiongkok daratan, konsep "One Country, Two System" secara bertahap menjadi lingkungan yang damai dan stabil dapat diciptakan untuk reformasi, keterbukaan dan modernisasi. Dengan tujuan reunifikasi damai melalui pendekatan “One Country, Two System”, Taiwan, Hong Kong dan Makau juga dapat memperoleh banyak keuntungan baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Kebijakan “One Country, Two System” memiliki tujuan utama untuk persatuan nasional dengan beberapa alasan (Tiexun, On the Fundamental Characteristics of the “One Country, Two Systems” Policy, 2011).

Yang pertama kepentingan nasional yang utama. Isu Taiwan, Makau dan terutama Hong Kong dapat mengganggu kedaulatan dan integritas wilayah Tiongkok. Permasalahan ini berasal dari sejarah yang ada. Kebijakan yang dibuat oleh Tiongkok bertujuan untuk menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah. Kedua adalah pandangan nasionalisme. Penyatuan kembali bangsa Tiongkok didorong dengan adanya keinginan nasional Tiongkok. Sentimen nasional mendorong Tiongkok dengan berupaya untuk reunifikasi nasional dan mengusulkan gagasan “One Country, Two System”. Ketiga, untuk kebangkitan nasional. Dikarenakan sejarah, Hong Kong berada dibawah koloni Inggris.

Untuk mengakhiri pemisahan ini, Tiongkok ingin mencapai reunifikasi nasional dan integritas territorial. Ketika Tiongkok mencapai reunifikasi sepenuhnya, Tiongkok dapat sepenuhnya menghilangkan ancaman yang mempersatukan bangsa Tiongkok secara keseluruhan, menciptakan kejayaan nasional, menjaga kemerdekaan nasional dan tidak tunduk pada tindakan dan kehendak orang lain. Kebijakan “One Country, Two System” secara keseluruhan sejalan dengan asas persatuan nasional. Basic Laws of Hong Kong SAR akan didirikan dan di bawah prinsip "One Country, Two System", sistem dan kebijakan sosialis tidak akan dipraktikkan di Hong Kong. Ketentuan khusus di seluruh Undang-Undang Dasar semuanya mencerminkan prinsip menjaga kedaulatan nasional dan persatuan nasional (Tiexun, On the Fundamental Characteristics of the “One Country, Two Systems” Policy, 2011). Untuk mencapai reunifikasi, pemerintah tidak menggunakan militer karena berdasarkan teori Interdependensi Kompleks, penggunaan atau ancaman kekuatan selalu kurang terbukti dalam masalah moneter internasional dibandingkan di ruang dan sumber daya lautan. Dalam hal ini, politik uang saling ketergantungan yang kompleks lebih baik daripada politik ruang dan sumber daya Samudra (Tiexun, 2011).

Dapat disimpulkan, didalam teori Interdependensi Kompleks yang dikemukakan oleh Robert O. Keohane, sesuai dengan karakteristik teori interdependensi kompleks, kekuatan militer (role of force) tidak digunakan dalam menyelesaikan isu ini. Ketika ketergantungan terjadi, kekuatan militer menjadi tidak relevan dalam penyelesaian masalah. Keohane

menjelaskan dalam bukunya bahwa kekuatan militer dapat menjadi tidak relevan untuk menyelesaikan perselisihan tentang masalah ekonomi di antara negara yang beraliansi, namun pada saat yang sama menjadi sangat penting untuk hubungan politik dan militer. Seperti yang dilakukan oleh Tiongkok, Deng Xiaoping membuat sistem “One Country, Two System” dalam menyelesaikan masalah krisis politik di Hong Kong. Dikarenakan Tiongkok yang sangat ingin mempertahankan Hong Kong, Tiongkok membuat sistem ini sesuai dengan karakteristik mereka, namun tetap mempertahankan sistem yang telah dimiliki Hong Kong untuk menghindari keinginan Hong Kong lepas dari Tiongkok.

3.2 Hong Kong dan Tiongkok dalam Mencapai Tujuan Kedua belah pihak (Multiple Issues)

Tidak adanya hierarki yang sama antar kedua aktor membuat setiap aktor memiliki kepentingan masing – masing yang ingin mereka capai. Keohane menjelaskan bahwa setiap negara yang berbeda menghasilkan koalisi yang berbeda, baik di dalam pemerintah maupun di antara organisasi. Seperti Hong Kong dan Tiongkok, kedua aktor memiliki kepentingannya masing – masing. Hal ini menandakan bahwa tidak adanya hierarki dan susunan yang jelas mengenai isu dan kepentingan yang menjadi fokus utama seorang aktor. Hal ini membuat setiap aktor yang terlibat memiliki area isu utama yang berbeda-beda. Dalam menjalankan sistem yang dibentuk oleh Deng Xiaoping ini, kedua aktor tentu saja memiliki tujuan dan kepentingannya masing – masing (Nye R. O., 2011).

Hong Kong yang merupakan wilayah koloni Inggris yang sudah dikembalikan ke Tiongkok tahun 1997, diatur dibawah “One Country, Two System” yang memberikan Hong Kong kebebasan yang berbeda dengan Tiongkok daratan. Dengan kebebasan yang dimiliki Hong Kong, Hong Kong menjadi wilayah yang menjadi pusat keuangan dunia dan menjadi wilayah dengan bisnis global. Hal ini menguntungkan Tiongkok karena Hong Kong menjadi pintu masuk Tiongkok untuk terhubung dengan perekonomian dunia. Karena hal tersebut, banyak perusahaan Tiongkok yang memanfaatkan akses Hong Kong ke investor global untuk mengumpulkan dana. Otonomi dari Tiongkok daratan mendukung posisi Hong Kong sebagai pusat keuangan dan bisnis global terkemuka.

3.2.1 Tiongkok Membutuhkan Hong Kong dalam Bidang Ekonomi

Hong Kong adalah pusat keuangan dan pengiriman global yang telah berkembang pesat karena kedekatannya dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, peringkat pertama di dunia dalam perdagangan sebagai persentase dari PDB. Pajak yang relatif rendah, sistem keuangan yang sangat maju, regulasi yang ringan, dan ciri-ciri kapitalis lainnya menjadikan Hong Kong salah satu pasar paling menarik di dunia. Hong Kong selalu berada di posisi teratas dalam laporan daya saing ekonomi global. Sebagian besar bank dan perusahaan multinasional besar dunia memiliki kantor pusat regional di Hong Kong (Albert, 2014).

Hong Kong adalah mitra dagang terbesar kedua Tiongkok setelah Amerika Serikat. Hong Kong merupakan sumber investasi asing langsung (FDI) terbesar di Tiongkok dan tempat di mana perusahaan Tiongkok

mengumpulkan modal luar negeri dalam jumlah besar. Kurang lebih ada delapan ratus perusahaan daratan terdaftar di bursa saham Hong Kong. Sementara itu, Hong Kong sangat bergantung pada daratan karena Tiongkok menyumbang lebih dari setengah dari total perdagangan kota pada tahun 2013, dan juga merupakan sumber FDI (Albert, 2014).

Hong Kong merupakan wilayah yang dapat mempengaruhi Tiongkok, karena wilayah tersebut memiliki apa yang dibutuhkan oleh kepemimpinan Beijing dan apa yang diinginkan oleh rakyat Tiongkok daratan. Hong Kong memiliki apa yang dibutuhkan oleh para pemimpin Tiongkok dengan mekanisme pasar bebas, sistem hukum, dan reformasi pendidikan. Dengan diperkenalkannya konsep "One Country, Two System" dan penandatanganan deklarasi Tiongkok-Inggris, RRC memiliki tujuan untuk meningkatkan hubungan ketergantungan Hong Kong oleh Tiongkok, yang berarti saling ketergantungan ekonomi yang lebih besar. Tiongkok ingin menggantikan Amerika Serikat sebagai mitra dagang utama Hong Kong pada tahun 1985 (Scobell, *Hong Kong's Influence on China: The Tail That Wags the Dog?*, 1988).

Hong Kong tidak hanya memiliki apa yang diinginkan Beijing, tetapi juga memiliki apa yang diinginkan rakyat Tiongkok yaitu citra yang baik dan modern. Hong Kong yang dikenal sebagai wilayah yang maju dan modern, Hong Kong juga merupakan sumber kekayaan ekonomi melalui kerabat, transaksi bisnis, dan pariwisata. Seperti contohnya Dolar Hong Kong, beredar cukup bebas (dan ilegal) di Tiongkok selatan, memberikan daya beli yang lebih besar kepada pemegangnya. Hong Kong juga dapat

memberikan contoh utama untuk bentuk demokrasi atau konsultasi Tiongkok yang terbatas dan khas dalam pemerintahan (Scobell, Hong Kong's Influence on China: The Tail That Wags the Dog?, 1988).

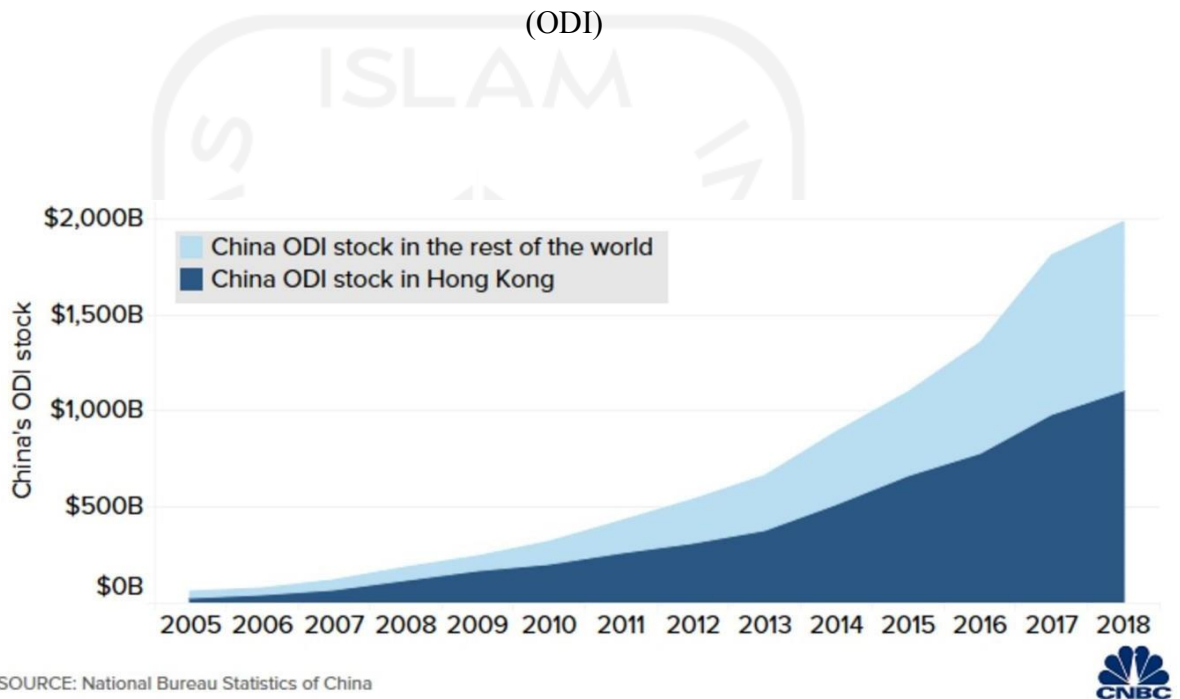
Hong Kong memiliki peran dalam membuka pasar global bagi perusahaan Tiongkok. Hong Kong bukan hanya sumber modal utama bagi perusahaan Tiongkok, tetapi juga memainkan peran penting dalam membuka pasar global bagi mereka.

- a) Hong Kong adalah penerima investasi asing langsung terbesar dari Tiongkok

Hampir dua pertiga dari arus investasi langsung Tiongkok diperantara melalui peraturan Hong Kong yang mendukung Hong Kong dalam memainkan perannya. Sistem Hong Kong dipercaya, dan investasi dari Hong Kong dianggap lebih andal. Dengan demikian, Hong Kong memberikan batu loncatan bagi bisnis Tiongkok untuk mengakses pasar global. Hong Kong juga secara sering digunakan sebagai basis di mana para pengusaha atau pejabat Tiongkok daratan menghindari pajak yang ketat di Tiongkok daratan (Belanda, 2016). Departemen Sensus dan Statistik Pemerintah Hong Kong melaporkan bahwa sumber terbesar Inward Direct Investment ke Hong Kong adalah British Virgin Islands (Departemen Sensus dan Statistik, 2018). keuangan ini “round-tripping” tidak secara langsung terkait dengan institusi Hong Kong, tetapi terkait dengan otonomi kota dan pajak.

Berikut table yang menunjukkan stok kumulatif investasi langsung luar negeri Tiongkok, atau ODI, di Hong Kong dan seluruh dunia:

Grafik 1: Stok kumulatif investasi langsung luar negeri Tiongkok



(Lee Y. N., 2020)

b) Hong Kong adalah pusat utama pembiayaan perdagangan

Perdagangan dan pembiayaan perdagangan adalah kunci pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Krisis Keuangan Global tahun 2007/2008 diikuti oleh jatuhnya perdagangan dunia, dan para ahli menunjuk pada berkurangnya pasokan pembiayaan perdagangan setelah krisis likuiditas global untuk menjelaskan hal ini (Accominotti, Ugolini: 2019; Ahn et al., 2011, Del Prete dan Federico 2014). Hong Kong memiliki 77 dari 100 bank

terbaik dunia dan telah menjadi pusat keuangan perdagangan internasional utama sejak pasca PD II. ETradeConnect Platform Keuangan Perdagangan Hong Kong, yang menggunakan blockchain dan kecerdasan buatan (Weinland, 2018) semakin meningkatkan daya saing dan kepentingan kota bagi Tiongkok daratan.

Selain peran penting Hong Kong dalam pembiayaan perdagangan secara umum, keahlian dan reputasi keuangan Hong Kong memiliki peran penting dalam Belt and Road Initiative. Dengan Tiongkok menginvestasikan ratusan miliar di seluruh dunia, otonomi Hong Kong, reputasi, valuta asing yang besar, dan pasar sekuritas menjadi sangat penting, menghilangkan hambatan perdagangan dan investasi.

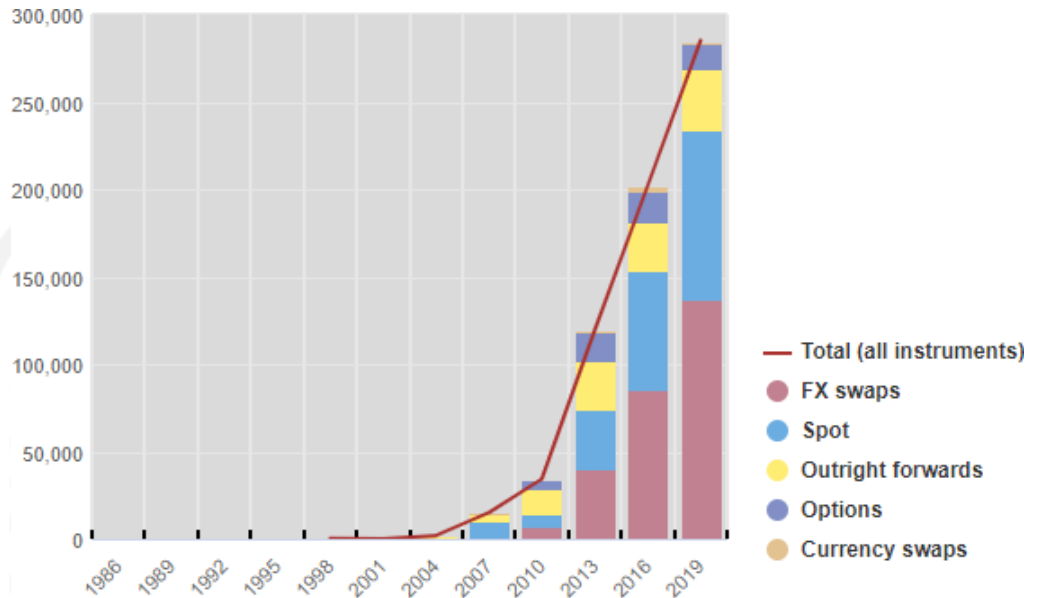
c) Hong Kong adalah pusat teratas untuk internasionalisasi Renminbi (Yuan)

Pada saat ini, Presiden Xi Jinping memiliki tujuan untuk meningkatkan konvertibilitas mata uang (pertukaran mata uang bebas) untuk meningkatkan perluasan perdagangan. Hong Kong memiliki kolam likuiditas terbesar di luar Tiongkok daratan sehingga ambisi pemerintah Tiongkok untuk internasionalisasi Renminbi dapat mengurangi biaya transaksi perdagangan, mengurangi kekuatan dolar dan menurunkan biaya pinjaman. Dalam hal ini, Hong Kong menjadi strategi agar dapat berjalan sesuai rencana.

Status Hong Kong sebagai pusat keuangan dan bisnis global juga telah membantu China untuk mempromosikan penggunaan mata uang

global yang lebih besar, renminbi atau yuan China. Berikut omset pasar valuta asing global Remnibi:

Grafik 2: Valuta asing global Remnibi



Source: BIS Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Over-the-counter (OTC) Derivatives Markets.

d) Pinjaman bank

Hong Kong penting bagi Tiongkok dalam skala pinjaman dan pinjaman bank lintas batas antara Hong Kong dan Tiongkok. Hong Kong adalah rumah bagi 40% penduduk China dan klaim perusahaan pada sistem perbankan internasional. Angka ini mencakup berbagai aktivitas keuangan termasuk pinjaman bank langsung, kepemilikan sekuritas, perbankan swasta, pembiayaan perdagangan, perdagangan, dan banyak lagi (Why Hong Kong matters, 2019).

Sejak Hong Kong diserahkan pada tahun 1997, Tiongkok mengembangkan kepentingan ekonomi mereka dan bisnis yang besar di

wilayah tersebut. Pemerintahan Tiongkok menyadari bahwa mereka membutuhkan Hong Kong yang kapitalis untuk mencapai kemakmuran ekonomi. Hong Kong merupakan kunci untuk mempengaruhi Tiongkok, karena wilayah tersebut memiliki apa yang dibutuhkan oleh kepemimpinan Beijing dan apa yang diinginkan oleh rakyat Tiongkok daratan. Tiongkok banyak menggunakan wilayah Hong Kong sebagai jalur masuk ekspor perdagangan sebesar 60%. Hong Kong juga merupakan titik pengiriman penting untuk perdagangan internal Tiongkok (Scobell, *Hong Kong's Influence on China: The Tail That Wags the Dog?*, 1988).

3.2.2 National Interest Hong Kong

Ada beberapa interpretasi Beijing tentang Basic Law Hong Kong. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa hal ini dapat membahayakan otonomi tingkat tinggi di Hong Kong. Pada April 2004, badan nasional Tiongkok membuat dua ketentuan lampiran Basic Law. Interpretasi ini memiliki implikasi besar bagi demokratisasi di Hong Kong:

- a) Paragraf 7 Lampiran I tentang metode pemilihan umum dalam memilih kepala eksekutif Hong Kong. Dinyatakan bahwa “jika ada kebutuhan” untuk mengubah metode pemilihan kepala eksekutif untuk istilah “setelah tahun 2007,” setiap amandemen harus dibuat dengan dukungan dari dua pertiga mayoritas badan nasional Hong Kong dan persetujuan dari kepala eksekutif. Amandemen tersebut juga harus dilaporkan ke badan nasional di Beijing “untuk mendapatkan persetujuan”.

- b) Bagian III dari Lampiran II menggunakan hal yang serupa mengenai pilihan legislator Hong Kong, kecuali bahwa setiap amandemen metode pemilihan harus dilaporkan ke badan nasional “untuk dicatat.” (Hung, 2004).

Sejak Inggris menyerahkan Hong Kong ke China pada tanggal 1 Juli 1997, demokratisasi di Hong Kong telah menjadi faktor penting dalam evolusi politik dan strategis Tiongkok. Demokratisasi di Hong Kong dapat mempengaruhi masa depan politik Tiongkok. Jika Tiongkok mengizinkan Hong Kong menjadi sebuah wilayah yang memiliki demokrasi penuh, hal ini akan menunjukkan masa depan yang baik untuk reformasi politik di Tiongkok, yang tentu saja akan membantu menyelesaikan masalah dalam hubungan AS-Tiongkok dalam masa depan politik Taiwan. Sebaliknya, jika Beijing gagal untuk mengizinkan demokrasi penuh, AS pasti akan memiliki hubungan yang buruk dan jauh lebih sulit dengan Tiongkok, termasuk di Taiwan. Sehingga, keputusan yang akan dilakukan kepada Hong Kong tentu akan mempengaruhi hubungan Tiongkok dengan yang lain (Hung, 2004).

Hong Kong menginginkan sistem politik yang demokrasi sehingga adanya Gerakan demokrasi Hong Kong membuat ratusan ribu warga berbaris melalui pusat kota Hong Kong pada 1 Juli 2004, menuntut pengenalan awal demokrasi penuh. Hingga saat ini, Hong Kong memiliki demokrasi yang terbatas: hanya dua puluh empat dari enam puluh legislator petahana yang dipilih secara langsung, dan kepala eksekutif saat ini dipilih oleh sebuah komite yang terdiri dari 800 profesional dan eksekutif bisnis pro-Beijing. Sebagian besar penduduk Hong Kong ingin memiliki hak untuk memilih semua legislator dan kepala eksekutif tetap berharap untuk

menjaga stabilitas dan kemakmuran yang telah mereka nikmati selama beberapa decade (Hung, 2004).

Demokrat di Hong Kong berasal dari berbagai latar belakang, termasuk pengacara, aktivis kelompok nonpemerintah, dan anggota partai politik, yang paling menonjol adalah Partai Demokrat yang sebelumnya dipimpin oleh Martin Lee. Sesuai dengan pengacara atau akademis mereka, banyak dari partai demokrat adalah orang-orang moderat yang pendekatan rasionalnya menarik bagi sebagian besar warga. Secara teoritis, demokrat dapat mengalahkan Beijing dengan ancaman kerusuhan dan revolusi besar-besaran, tetapi kebanyakan orang di Hong Kong pragmatis, dan mereka sadar akan banyak kerugian. Mereka ingin menjaga keutuhan kerangka hukum, kemakmuran, dan stabilitas kota (Hung, 2004).

Multiple issues atau absence of hierarchy among issues yang terdapat dalam karakteristik teori interdependensi kompleks cukup menjelaskan bagaimana Hong Kong dan Tiongkok memiliki kepentingan yang berbeda (Nye R. O., 2011). Tiongkok memiliki kepentingan untuk mempertahankan Hong Kong karena alasan ekonomi. Hal ini ditandai dengan Hong Kong yang menjadi pintu masuk bagi Tiongkok untuk menjalin Kerjasama dengan negara lain karena sistem ekonomi Hong Kong yang kapitalisme. Sedangkan kepentingan Hong Kong lebih kepada ingin mempertahankan sistem demokrasi negara mereka tanpa ada interpretasi dari pihak Tiongkok.

3.3 Perekonomian Hong Kong dibawah “One Country, Two System” (Multiple Channels)

Keohanne menjelaskan dalam karakteristik teori interdependensi kompleks, multiple channels adalah yang menghubungkan masyarakat dan dapat disimpulkan bahwa hal ini merupakan hubungan antar negara bagian, antarpemerintah, dan transnasional (Nye R. O., 2011). Tiongkok dan Hong Kong saling bergantung dan saling terhubung dikarenakan adanya sejarah dan perekonomian. Pada dasarnya, Hong Kong merupakan bagian dari Tiongkok. Yang membuat mereka terpisah adalah setelah Hong Kong dibawah koloni Inggris sehingga dalam pemerintahannya, Hong Kong menyerap sistem yang ada di Inggris untuk digunakan dalam pemerintahan Hong Kong. Kemudian alasan ekonomi juga menjadi salah satu faktor Hong Kong dan Tiongkok saling terhubung. Tiongkok menjadikan Hong Kong sebagai mitra utama untuk menekan pengaruh Amerika Serikat di Hong Kong.

Penyerahan Hong Kong dari Inggris ke Tiongkok pada tahun 1997 menjadi titik balik politik dan ekonomi utama bagi Hong Kong. Hong Kong masih berjuang antara intervensi dan non-intervensi dalam mencari penyelesaian yang tepat untuk merestrukturisasi ekonominya. Selama masa jabatan CE Tung Chee-hwa, secara ekonomi, perekonomian HKSAR sangat jatuh karena krisis keuangan Asia tahun 1997–1998. Menghadapi kemerosotan ekonomi ini, Hong Kong memiliki ambisi untuk membuktikan kemampuannya dan keinginan untuk membangun legitimasi kinerja tinggi untuk pemerintahan barunya (Chiu, 2002).

Ketika masa pemerintahan Donald Tsang digantikan Tung sebagai (Chief Executive) CE, beliau mengubah arah kebijakan industri Hong Kong bergerak lebih dekat ke tujuan non-intervensi. Pemerintah masih menyoroti beberapa pilar industri tradisional seperti jasa keuangan, pariwisata, dan logistik di mana Hong Kong harus mempertahankan daya saingnya, dan enam industri baru, antara lain layanan pendidikan, layanan medis, pengujian dan sertifikasi, industri lingkungan, inovasi dan teknologi, budaya dan industri kreatif yang akan dipromosikan untuk pengembangan lebih lanjut dan diversifikasi ekonominya. Namun, terlepas dari intervensi atau non-intervensi, tampaknya tidak dapat mengubah fakta bahwa lebih dari satu dekade setelah penyerahan, basis ekonomi Hong Kong masih sempit (Chiu, 2002).

Ada beberapa alasan politik dan kelembagaan utama yang menyebabkan kegagalan pemerintah HKSAR dalam berhasil merestrukturisasi ekonomi:

1. Pertama, meskipun tidak ada konsensus yang jelas tentang apakah pendekatan intervensionis lebih disukai daripada pendekatan non-intervensi karena ada negara-negara yang mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat dengan kedua pendekatan tersebut, secara luas diakui bahwa pendekatan intervensionis membutuhkan lebih banyak kapasitas negara dan otonomi negara, yang meliputi keahlian dari birokrasi dan informasi yang lebih tepat tentang ekonomi. Namun, dalam kasus Hong Kong, banyak pembuat kebijakan kekurangan pelatihan dan keahlian profesional yang diperlukan. Selain itu, pembangunan ekonomi yang dipimpin oleh birokrasi seringkali

hanya diterapkan untuk mempercepat laju industrialisasi mengikuti jalur perkembangan negara-negara Barat yang sudah dikenal. Sejalan dengan kemajuan Hong Kong ke ekonomi baru di mana hanya ada sedikit model yang terbukti berhasil untuk ditandingi.

2. Kedua, model "Hong Kong yang memerintah pengusaha" gagal meningkatkan dan mengubah ekonomi. Tanpa demokrasi yang sebenarnya dan dengan kurangnya kepercayaan pada layanan sipil yang dilatih dan disosialisasikan di bawah pemerintah kolonial Inggris, CPG telah mengadopsi "pelembagaan bisnis dalam politik" setelah penyerahan dengan mempercayakan bisnis dengan tanggung jawab utama pemerintah dan kooptasi perwakilan bisnis ke dalam pembentukan politik (Chiu & Lui 2001).

Ketidak jelasan pengembang properti besar dalam pembuatan kebijakan ekonomi dan pertumbuhan kapitalisme telah menciptakan persaingan yang tidak merata, membuat Hong Kong kurang menarik untuk bisnis kecuali bagi mereka yang terhubung secara politik.

3.3.1 Pemulihan Ekonomi dan Restrukturisasi Ekonomi Tahun 2008

– 2015

Kebijakan ekonomi merupakan salah satu pengaruh dan pendorong persaingan perusahaan, yang hal tersebut menciptakan kondisi pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Sehingga Hong Kong menjadi salah satu dari empat Macan Asia, bersama dengan Singapura, Korea Selatan dan Taiwan. Saat ini, PDB per kapita pada daya beli adalah yang

tertinggi ke-13 di dunia. Oleh karena itu, Hong Kong berhasil hanya dalam beberapa dekade mengubah ekonominya menjadi salah satu yang terkaya di dunia (Minardi, 2013).

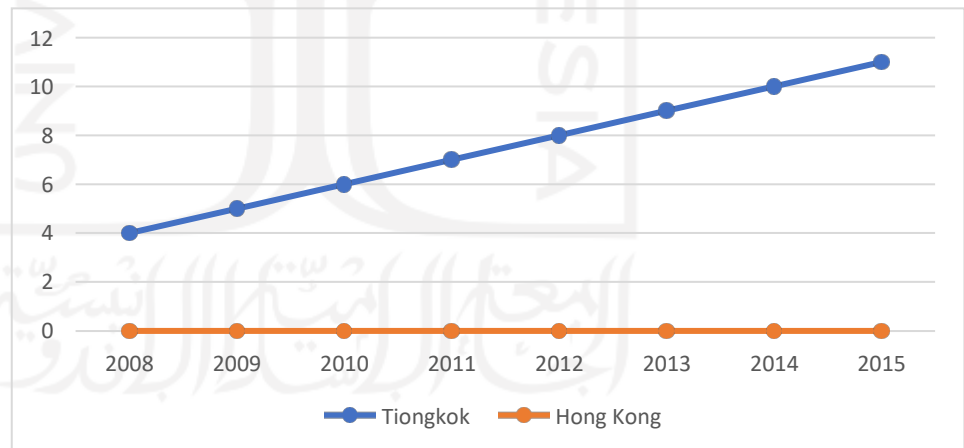
Sektor manufaktur Hong Kong mulai menurun pada akhir 1970-an karena kenaikan harga tanah dan kenaikan gaji. Namun, integrasi ekonomi Hong Kong yang meningkat dengan Tiongkok daratan membuat Hong Kong dapat merelokasi produksinya ke zona ekonomi khusus di provinsi yang berbatasan dengan Guangdong (Minardi, 2013). Zona ini, yang didirikan mulai tahun 1980, menawarkan kesempatan kepada investor Hong Kong untuk meningkatkan daya saing mereka dengan mengandalkan tenaga kerja murah yang berlimpah, sambil tetap mempertahankan kondisi non-intervensi yang sama dari pemerintah Tiongkok. Dari 1978 hingga 1997, perdagangan antara Hong Kong dan Republik Rakyat Tiongkok tumbuh pada tingkat tahunan rata-rata 28%. Pada akhir tahun 1997, investasi langsung dari Hong Kong mencapai 80% dari semua investasi asing langsung di Guangdong (Minardi, 2013).

Perkembangan baru ini mengubah ekonomi Hong Kong secara signifikan. Pangsa industri ekonomi menurun dari 31% pada tahun 1980 menjadi 14% pada tahun 1997 dan 8% pada tahun 2008. Sebaliknya, sektor jasa meningkat pesat, dari 68% pada tahun 1980 menjadi 86% pada tahun 1997 dan 92% pada tahun 2008. Sejak 1997, ekonomi Hong Kong telah menjadi pusat layanan bernilai tambah tinggi (keuangan, manajemen, logistik, konsultasi bisnis, perdagangan, dll.), Bagi bisnis Tiongkok yang

ingin masuk ke pasar internasional maupun bisnis di seluruh dunia untuk akses ke pasar Tiongkok daratan dan negara Asia lainnya (Minardi, 2013).

Kurangnya re-industrialisasi dan pendalaman teknologi membuat Hong Kong rentan terhadap volatilitas (besaran perubahan harga yang menunjukkan fluktuasi pasar dalam satu periode tertentu) ekonomi. Hong Kong sangat bergantung pada keuangan dan jasa dan hal ini membuat Hong Kong rentan terhadap krisis keuangan. Selain itu hal tersebut juga membuat Hong Kong mengalami kegagalan untuk meningkatkan produksi lokal dan ketergantungan yang sangat besar (YUEN, 2012). Hong Kong yang dikenal sebagai wilayah dengan perekonomian yang maju, memiliki GDP yang lebih rendah dibandingkan Tiongkok.

Grafik 3: GDP (US\$) - China, Hong Kong SAR



Source: <https://data.worldbank.org/>

Setelah terjadi Krisis Ekonomi Asia 2008, Tahap pertama yang dilakukan Hong Kong dalam pembangunan ekonomi, Hong Kong mengandalkan industri manufaktur mereka. Reformasi ekonomi Tiongkok

Daratan dan kebijakan keterbukaan terhadap investasi asing yang diberlakukan oleh Deng Xiaoping mulai tahun 1978 sangat mengubah sifat ekonomi Hong Kong di tahun-tahun selanjutnya (YUEN, 2012).

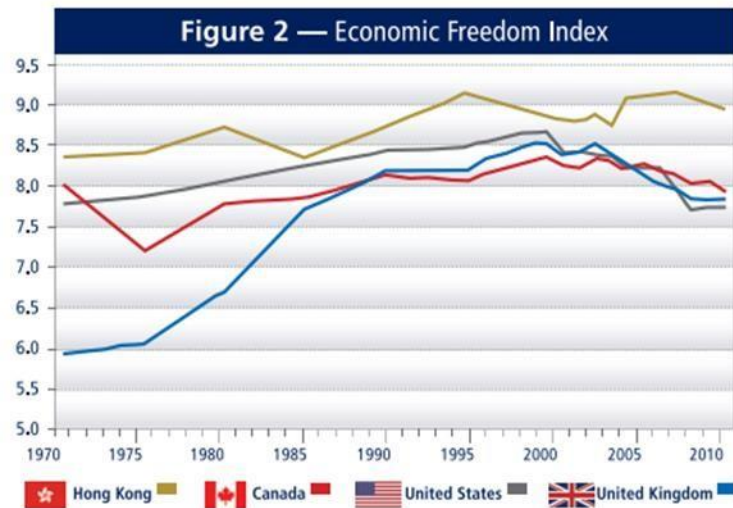
Integrasi ekonomi antara Hong Kong dan Tiongkok telah memperdalam hubungan dan interaksi mereka. Tiongkok tetap menjadi mitra dagang terbesar Hong Kong pada tahun 2009, terhitung 49% dari total nilai perdagangan di Hong Kong. Selain itu, 90% dari ekspor ulang Hong Kong terkait dengan Tiongkok Daratan baik sebagai pasar atau sumber. Tiongkok juga merupakan sumber investasi asing langsung terbesar di Hong Kong. Pada tahun 2008, Tiongkok menginvestasikan total US \$298 miliar di Hong Kong, yang merupakan 37% dari total investasi langsung eksternal Hong Kong. Faktanya, sejak kebijakan pintu terbuka tahun 1978, perdagangan antara Hong Kong dan Tiongkok Daratan telah meningkat 231 kali lipat, dengan tingkat kenaikan tahunan rata-rata sebesar 19% dalam hal nilai (YUEN, 2012).

Untuk mempertahankan konsep institusi free-market Hongkong, dalam Deklarasi Bersama Sino-Inggris, yang ditandatangani pada 19 Desember 1984, ditetapkan bahwa Hong Kong akan berhenti menjadi wilayah di bawah kendali Inggris pada 1 Juli 1997. Prinsip "One Country, Two System" juga disepakati. Kecuali urusan luar negeri dan pertahanan nasional, Hal ini memberikan otonomi luas kepada Hong Kong dan memungkinkannya untuk mempertahankan sistem kapitalisnya serta cara hidupnya untuk jangka waktu 50 tahun, hingga tahun 2047 (Minardi, 2013)

Hong Kong yang merupakan Daerah Administratif Khusus Republik Rakyat Tiongkok, telah mempertahankan sebagian besar sistem politik, peradilan, ekonomi dan keuangan yang menjadi ciri koloni ketika berada di wilayah Inggris. Kekuasaan kehakiman tidak bergantung pada kekuatan politik dan terus beroperasi di bawah sistem hukum umum yang diwarisi dari Inggris. Hak properti dijamin oleh Undang-Undang Dasar, yang saat ini berfungsi sebagai konstitusi Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, dan warga negara menikmati kebebasan individu yang mendasar (Minardi, 2013).

Menurut indeks Kebebasan Ekonomi Dunia Fraser Institute, ekonomi Hong Kong telah menjadi yang paling bebas di dunia sejak tahun 1970.

Grafik 4: Indeks Kebebasan Ekonomi



Source: *Economic Freedom of the World Report 2013*, Fraser Institute, 2013.

Note: The economic freedom index measures the degree of economic freedom in 151 countries on a scale of 0 to 10, in which 0 indicates the absence of economic freedom and 10 a high level of economic freedom.

Kebebasan ekonomi Hong Kong bertumpu pada elemen:

1. Pemerintah yang lebih kecil

Pengeluaran pemerintah sebagai persentase dari PDB hanya 19,2% di Hong Kong. Pajak penghasilan pribadi adalah 15% tetap dan tarif pajak perusahaan ditetapkan pada 16,5%. Di Hong Kong tidak ada pajak penjualan, dan tidak ada pajak atas dividen atau capital gain.

2. Peraturan kegiatan ekonomi yang fleksibel dan efisien

Hong Kong adalah tempat termudah kedua di dunia untuk menjalankan bisnis. Hong Kong selalu memiliki pasar tenaga kerja yang fleksibel, meskipun pada tahun 2011, legislatif mengadopsi, untuk pertama kali dalam sejarahnya, undang-undang upah minimum. Akhirnya, dolar Hong Kong adalah mata uang yang stabil dan dapat dikonversi sepenuhnya.

3. Keterbukaan terhadap perdagangan internasional

Hong Kong tidak memungut bea masuk dan tidak memberlakukan kuota. Sebagian besar perdagangan barang terjadi dengan Tiongkok daratan, yang menyumbang 54,1% dari total nilai ekspor pada tahun 2012, serta 47,1% dari impor. Tidak ada pembatasan masuk atau repatriasi modal baik, maupun pada konversi dan transfer keuntungan dan dividen dari investasi langsung. Hal ini menjelaskan mengapa Hong Kong menduduki peringkat ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Tiongkok daratan dalam hal arus masuk investasi asing langsung pada tahun 2012, dan keempat setelah Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok daratan dalam hal arus keluar (Minardi, 2013).

Para investor, baik mereka penduduk Hong Kong atau bukan. Tidak ada batasan kepemilikan asing. Orang asing dapat berinvestasi dalam bisnis lokal dan memiliki hingga 100% modal. Kekayaan intelektual dilindungi, dan Hong Kong adalah salah satu masyarakat yang paling tidak korup di dunia. Pada tahun 2003, Hong Kong menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Lebih Dekat (CEPA) dengan Tiongkok daratan yang membuat investor asing difasilitasi akses yang mudah. Hampir semua barang dan jasa yang diproduksi di Hong Kong dapat memasuki pasar Tiongkok daratan tanpa membayar bea masuk (Minardi, 2013). Penandatanganan Closer Economic Partnership Arrangement (CEPA), pengenalan Individual Visit Scheme, dan kerjasama ekonomi Pearl River Delta (PRD) adalah beberapa contoh produk politik yang dibentuk secara ekonomis. Menjaga kesehatan ekonomi Hong Kong dapat menunjukkan kelangsungan hidup "One Country, Two System" ke Taiwan. Memperkuat ekonomi Hong Kong juga merupakan bagian penting dari strategi politik Tiongkok Daratan (YUEN, 2012).

Pada 2014, Hong Kong memulai negosiasi perjanjian perdagangan bebas dengan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Anggota ASEAN ingin membentuk pasar tunggal pada tahun 2015. Kelompok ini terdiri dari negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia dan Thailand, yang kelas menengahnya sedang berkembang penuh, dan negara berkembang dengan tenaga kerja murah seperti Vietnam, Laos, Burma dan Kamboja. Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas dengan ASEAN juga akan memungkinkan Hong Kong untuk mengambil bagian dalam

negosiasi Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan zona perdagangan bebas yang luas untuk barang, jasa dan investasi antara negara-negara anggota ASEAN dan negara-negara yang telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas (Australia, Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan dan Selandia Baru). Oleh karena itu, perjanjian seperti itu akan mencakup semua ekonomi utama Asia (Minardi, 2013).

Saling ketergantungan yang kompleks memiliki tiga karakteristik utama:

1. Berbagai saluran menghubungkan masyarakat, termasuk: hubungan informal antara elit pemerintah serta pengaturan kantor luar negeri formal; hubungan informal antara elit nonpemerintah (tatap muka dan melalui telekomunikasi); dan organisasi transnasional (seperti bank atau perusahaan multinasional). Saluran ini dapat diringkas sebagai hubungan antar negara bagian, antarpemerintah, dan transnasional.

Selain itu, perusahaan multinasional dan bank mempengaruhi hubungan domestik dan antar negara bagian. Batasan pada perusahaan swasta, atau kedekatan hubungan antara pemerintah dan bisnis, sangat bervariasi dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya; tetapi partisipasi organisasi besar dan dinamis, yang tidak dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah, telah menjadi bagian normal dalam hubungan luar negeri maupun dalam negeri. Aktor-aktor ini penting bukan hanya karena aktivitasnya dalam mengejar kepentingannya sendiri, tetapi juga karena berperan sebagai sabuk transmisi, sehingga kebijakan pemerintah di berbagai negara menjadi lebih sensitif satu sama lain. Dengan hal tersebut, melihat bagaimana hubungan Tiongkok dan Hong Kong sebagai negara dan Daerah Administratif Khusus Hong

Kong atau sebagai wilayah dengan otonomi khusus. Hubungan antara Hong Kong dan Tiongkok ini dapat dilihat bagaimana sistem yang dibentuk oleh Tiongkok mempengaruhi masa depan Hong Kong dan juga mempengaruhi hubungan mereka terhadap negara lain. Kedua aktor Tiongkok dan Hong Kong sangat penting karena mereka memiliki kepentingan sendiri. Kebijakan yang ada di Tiongkok akan menjadi sensitif untuk Hong Kong dan juga akan berpengaruh secara politik maupun ekonomi.

2. Agenda hubungan antarnegara terdiri dari beberapa masalah yang tidak diatur dalam hierarki yang jelas atau konsisten. Absennya hierarki antar persoalan ini antara lain berarti keamanan militer tidak secara konsisten mendominasi agenda. Banyak masalah muncul dari apa yang dulu dianggap sebagai kebijakan dalam negeri, dan perbedaan antara masalah dalam negeri dan luar negeri menjadi kabur. Masalah-masalah ini dibahas di beberapa departemen pemerintah (tidak hanya di kantor luar negeri), dan di beberapa tingkatan. Koordinasi kebijakan yang tidak memadai pada masalah ini melibatkan biaya yang signifikan. Masalah yang berbeda menghasilkan koalisi yang berbeda, baik di dalam pemerintahan maupun di antara mereka, dan melibatkan tingkat konflik yang berbeda. Didalam hal ini, kedua aktor yaitu Hong Kong dan Tiongkok memiliki tujuannya masing – masing dalam mencapai kepentingannya. Antara Hong Kong dan Tiongkok memiliki perbedaan masalah yang hal tersebut tidak memiliki titik terang untuk kepentingan Bersama. Masalah mereka yang berbeda akan menghasilkan keinginan dan Kerjasama yang berbeda dengan negara lain.

3. Kekuatan militer tidak digunakan oleh pemerintah terhadap pemerintah lain di dalam kawasan, atau pada masalah, ketika saling ketergantungan yang kompleks terjadi. Namun, ini mungkin penting dalam hubungan pemerintah ini dengan pemerintah di luar wilayah itu, atau dalam masalah lain. Kekuatan militer, misalnya, dapat menjadi tidak relevan untuk menyelesaikan perselisihan tentang masalah ekonomi di antara anggota aliansi, namun pada saat yang sama menjadi sangat penting untuk hubungan politik dan militer aliansi tersebut dengan blok saingan. Untuk hubungan sebelumnya, kondisi saling ketergantungan yang kompleks ini akan terpenuhi; untuk yang terakhir, tidak. Selain itu, kekuatan seringkali bukan cara yang tepat untuk mencapai tujuan lain (seperti kesejahteraan ekonomi dan ekologi) yang menjadi lebih penting. Sama seperti isu ini, kekuatan militer dianggap tidak relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan kepentingan yang ingin dituju dikarenakan, Tiongkok menginginkan transmisi yang pelan dan pasti dalam mengembalikan Hong Kong Kembali sebagai bagian dari mereka. Dengan itu, dibentuk sebuah sistem untuk mendukung keinginan tersebut yaitu “One Country, Two System” dimana didalam sistem ini Hong Kong akan dikembalikan secara perlahan dan baik.
- Sehingga, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Perekonomian Hong Kong akibat krisis Hong Kong dibawah “One Country, Two System” yang diciptakan oleh Tiongkok dengan analisis menggunakan Teori Interdependensi Kompleks yang dijelaskan oleh Robert O. Keohane dalam bukunya “Power and Interdependence”:

Tabel 1: Karakteristik Teori Interdependensi Kompleks

Karakteristik Teori Interdependensi Kompleks	Analisis
<p>Berbagai saluran (Multiple channels) menghubungkan masyarakat, hubungan antar negara bagian, antarpemerintah, dan transnasional yang saling bergantung</p>	<p>Tiongkok dan Hong Kong saling bergantung karena Tiongkok membutuhkan Hong Kong untuk alasan ekonomi dan Hong Kong merupakan bagian wilayah Tiongkok walaupun pernah disewa oleh Inggris dan sudah dikembalikan ke Tiongkok</p>
<p><i>absence of hierarchy among issues</i>, tidak adanya hierarki di antara masalah. (Multiple Issues)</p>	<p>Kedua aktor memiliki isu sendiri dan memiliki tujuan sendiri. Tiongkok yaitu isu ekonomi dan wilayah teritorial dan Hongkong isu krisis politiknya.</p>
<p>Kekuatan militer tidak digunakan oleh pemerintah terhadap</p>	<p>Tidak ada penggunaan militer dalam isu ini. karena Tiongkok</p>

pemerintah lain di dalam kawasan, atau pada masalah, ketika saling ketergantungan yang kompleks terjadi.	menggunakan sistem “one Country, Two system” untuk mempertahankan Hongkong sebagai wilayahnya
--	---



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Hong Kong merupakan wilayah yang disebut sebagai Special Administrative Region (HKSAR) karena Hong Kong adalah wilayah yang menggunakan sistem kapitalisme dan demokrasi. Hal ini sangat berbeda dengan Tiongkok daratan yang dikenal sebagai negara yang menganut komunis. Terjadinya Opium war I dan II yang di menangkan Inggris memaksa Tiongkok harus merelakan wilayah Kowloon (yang sekarang Hong Kong) dibawah koloni Inggris. Hal ini telah sesuai dengan Konvensi Peking Kedua, Dinasti Qing setuju untuk menyewa Hong Kong kepada Inggris secara gratis. Hong Kong disewa oleh Inggris selama 99 Tahun. Selama Hong Kong berada di bawah Inggris, Hong Kong menggunakan sistem demokrasi dalam menjalankan ekonomi dan pemerintahannya

Namun, pada tahun 1997, Hong Kong dikembalikan kepada Tiongkok setelah kekuasaan Inggris di wilayah itu berakhir selama 156 tahun. Dengan dikembalikannya Hong Kong kepada Tiongkok, Hong Kong ingin tetap menjadi wilayah yang demokrasi. Masyarakat Hong Kong tidak ingin Hong Kong menjadi wilayah yang sama dengan Tiongkok. Kemudian, Tiongkok membentuk sebuah sistem yang dikenal sebagai “One Country, Two System” yang memiliki makna bahwa mereka tetap dibawah Tiongkok namun dapat memiliki sistem negara yang berbeda. Hong Kong tetap dapat menjalankan negaranya sesuai dengan sistem yang sudah lama tertanam. Namun, hal ini membuat Hong Kong menjadi krisis politik karena terkadang Tiongkok mencampuri urusan Hong Kong. Hal ini tentu saja mempengaruhi perekonomian Hong Kong ketika “One Country, Two System” berlaku.

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah adalah teori *Interdependensi Kompleks* oleh Robert O. Keohane Joseph S.Nye. yang tertulis dalam bukunya *Power and Interdependence*. Karakteristik dari teori ini dapat digunakan dalam menganalisis bagaimana perekonomian Hong Kong dibawah “One Country, Two System” dan ketergantungan Tiongkok terhadap Hong Kong. Teori ini juga akan menjelaskan bagaimana Tiongkok menyatukan Hong Kong dibawah pemerintahan mereka tanpa menggunakan militer namun dengan sistem yang dibentuk dan disetujui oleh kedua aktor yaitu Tiongkok dan Hong Kong. Kemudian, dalam teori ini juga dijelaskan bahwa tidak ada hierarki dalam isu yang ada, dan dalam hal ini, akan menjelaskan bagaimana

Tiongkok dan Hong Kong memiliki kepentingan sendiri. Seperti Tiongkok yang membutuhkan Hong Kong untuk sebagai pintu mereka mencapai dan bekerjasama dengan negara lain serta untuk menyatukan wilayah Tiongkok. Sementara Hong Kong memiliki kepentingan untuk mempertahankan sistem mereka dan menstabilkan ekonomi setelah krisis yang terjadi ditahun 2008 dibawah sistem yang berlaku. Kemudian Tiongkok sangat bergantung kepada Hong Kong dalam bidang ekonomi dijelaskan dalam karakteristik teori interdependensi kompleks yaitu Multiple channels menghubungkan masyarakat. hubungan antar negara bagian, antarpemerintah, dan transnasional yang saling bergantung. Sehingga dalam isu ini, dalam menjawab rumusan masalah menggunakan karakteristik dari teori Interdependensi Kompleks dimana keadaan perekonomian Hong Kong setelah 2008 sampai 2015 masih bergantung kepada Tiongkok dikarenakan “One Country, Two System”. Tiongkok menggunakan sistem ini untuk mempertahankan Hong Kong tetap dibawah pemerintahannya dan tidak mengubah sistem yang ada di Hong Kong karena hal tersebut menguntungkan mereka. Ekonomi Hong Kong sangat membaik dari tahun 2008-2015 didukung dengan sistem perekonomian mereka. Hal ini menjadikan Hong Kong dikenal sebagai wilayah dengan perekonomian yang maju setara dengan Tokyo, Paris dan London.

4.2 SARAN

Hasil dari argumentasi dan analisis yang dilakukan, tulisan ini diharapkan mampu menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya terutama untuk Mahasiswa Hubungan Internasional dalam studi kasus “One Country,

Two System” oleh Tiongkok kepada Hong Kong. Namun, dilihat dari analisis dan kesimpulan, analisis ini masih banyak terdapat kekurangannya. Beberapa kekurangannya yaitu penelitian ini hanya terbatas pada perekonomian Hong Kong hingga tahun 2015 saja. Kemudian, data yang ada dalam menjelaskan perekonomian Hong Kong pertahun masih kurang karena keterbatasan sumber.

Untuk penelitian selanjutnya, mungkin dapat saya sarankan untuk menjelaskan perekonomian Hong Kong pertahun dengan data yang lebih signifikan dan dapat dilihat dengan jelas serta dalam pengaplikasian teori.



DAFTAR PUSTAKA

- Albert, E. (2014). Democracy in Hong Kong.
- Allison, G. T. (1969). CONCEPTUAL MODELS AND 'THE CUBAN MISSILE CRISIS.
- Anastasia Yip, U. B. (2015). Hong Kong and China: One Country, Two Systems, Two Identities.
- Annie Boyajian, S. C. (2019). Democratic Crisis in Hong Kong: Recommendations for Policymakers.
- ASEAN Organization. (2016, October 3). *Regional Comprehensive Economic Partnership*. Retrieved from ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIA NATION: https://asean.org/?static_post=rcep-regional-comprehensive-economic-partnership
- Burchil, S. (2005). *Theory of International Relations*. Houndmills: MACMILLAN.
- Capling, A. (2008). *Twenty Years Australia Engagement with Asia*. Australia: The Pacific Review.
- Chan, H. S. (2003). The Civil Service under One Country, Two Systems: The Cases of Hong Kong and the People's Republic of China.
- Chiu, P. Y. (2002). Economic Integration Between Hong Kong and Mainland China: The effect on Hong Kong of China's Entry to WTO.

- Church, P. (2009). *History of Southeast Asia*. Singapore: John Willey & Sons (Asia) Pte Ltd.
- Economic and Banking Environment. (2008). *HONG KONG MONETARY AUTHORITY*.
- Feige, J. A. (2005). The Opium Wars, Opium Legalization, and Opium Consumption in China. 5.
- Fifield, R. H. (1950). Hong Kong: Symbol of the West.
- Guan, S. (1984). Chartism and the First Opium War.
- Harding, H. (1993). The Concept of "Greater China": Themes Variations and Reservations. 660-686.
- Haris, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Harris, P. B. (1972). The International Future of Hongkong. *Royal Institute of International Affairs* .
- Hung, V. (2004). Getting to Democracy in Hong Kong.
- Ismanto, I. (2010). Perubahan Ekonomi Global dan Tantangan bagi Indonesia. *Tantangan ekonomi untuk Indonesia*.
- Kementerian Perdagangan Indonesia. (2018, May 30). *ASEAN-China Free Trade Agreement*. Retrieved from Kementerian Perdagangan Indonesia: <http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/asean/asean-1-fta/asean-china>
- Kin-ming, Y. C. (2014). Hong Kong Identity on the Rise.
- Laporan Triwulan BAPPENAS. (2013). *Perkembangan Ekonomi Indonesia*. Indonesia: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS.
- LEE, F. L. (2018). Changing Political Economy of the Hong Kong Media. pp. 9-18.
- Lee, J. C. (1999). Hong Kong—Mainland Relations after 1997.
- Lee, Y. N. (2020). *These charts show why Hong Kong is important to China*. CNBC.
- LEUNG, M. (2015). ‘One country, two systems’, ‘one city, two systems’: Citizenship as a stage for politics of mobility and bordering practices in Hong Kong.
- Lyke, B. (2016). *Does Trade Openness Matter for Economics Growth in CEE Countries?* Muenchen: Deakin University.
- Mahbubani, K. (2017). *The ASEAN Miracle*. Singapore: Ridge Books.
- Martin, M. F. (2007). Hong Kong: Ten Years After the Handover.

- Meick, E. (2019). Hong Kong's Proposed Extradition Bill Could Extend Beijing's Coercive Reach: Risks for the United States. *U.S.-China Economic and Security Review Commission* .
- Minardi, J.-F. (2013). Hong Kong: The Ongoing Economic Miracle.
- Nye, R. O. (2011). *Power and Interdependence*. Pearson.
- Nye, R. O. (2011). *Power and Interdependence*. Pearson.
- Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, J. (2011). *Power and Interdependence*. Boston: PEARSON.
- Sadiaa M., J. R. (2014). *The Oxford Handbook of The International Relations of Asia*. London: Oxford University Press.
- Sato, Y. (2013). Rational choice theory.
- Scobell, A. (1988). Hong Kong's Influence on China: The Tail That Wags the Dog? 599-612.
- Scobell, A. (1988). Hong Kong's Influence on China: The Tail That Wags the Dog? pp. 599-612.
- Snidal, D. (2012). Rational Choice and International Relations.
- So, A. Y. (2001). The Three Blessings of Hong Kong's Development.
- SO, A. Y. (2011). "One Country, Two Systems" and Hong Kong-China National Integration: A Crisis-Transformation Perspective. pp. 99–116.
- SO, A. Y. (2011). *"One Country, Two Systems" and Hong Kong-China National Integration: A Crisis-Transformation Perspective*. Hong Kong.
- Suhandoyo, S. (2013). METODE PENELITIAN KUALITATIF.
- Tiexun, L. (2011). *On the Fundamental Characteristics of the "One Country, Two Systems" Policy*.
- Tiexun, L. (n.d.). On the Fundamental Characteristics of "One Country Two System" Policy.
- Treat, P. J. (n.d.). Early Sino-Japanese Diplomatic Relation. *Pacific Historical Review*.
- Walt, S. M. (1999). Rigor or Rigor Mortis?: Rational Choice and Security Studies. 5-48.
- Wan, T. K.-y.-s. (2007). THE CHINA FACTOR IN THE HONG KONG PUBLIC'S CHANGING PERCEPTIONS OF "ONE COUNTRY, TWO SYSTEM".
- Wang, V. W.-C. (2006). China Economic Statecraft Toward Southeast Asia Free Trade Agreement and "Peacefull Rise". *American Journal of Chinese Studies*, 5-34.

- Weng, B. S. (1987/1988). The Hong Kong Model of "One Country, Two Systems": Promises and Problems.
- Why Hong Kong matters. (2019). *Understanding the importance of the city to China and the world*.
- Williamson, C. J. (1989). A One-country, Two-system Formula in the China of 1999.
- Yeung, C. (2001). Hong Kong Under One Country Two Systems: Promises and Realities.
- YUEN, W. W. (2012). Economic Policy of Hong Kong. 251-275.

